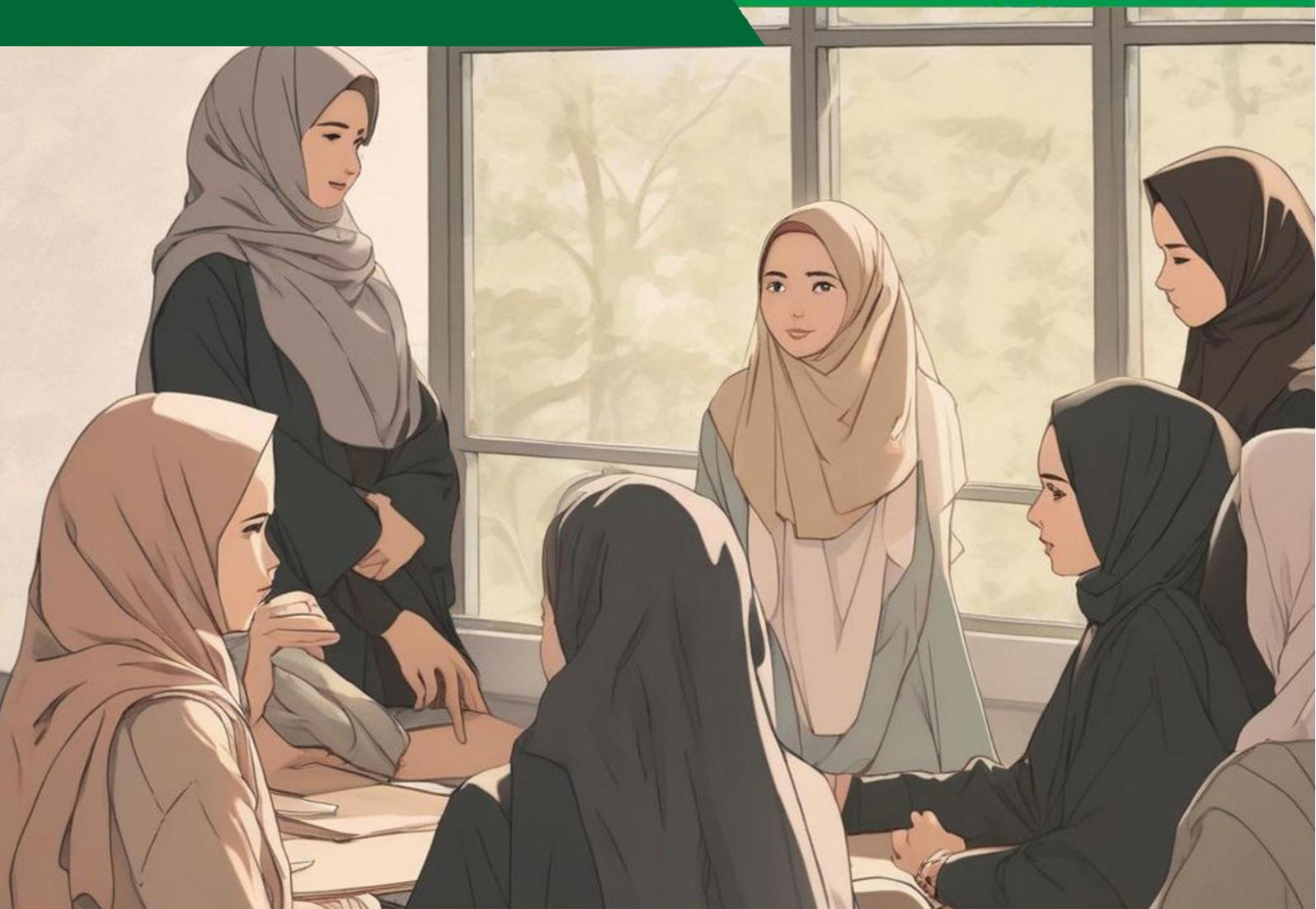


Modul Sekolah Inklusi Perempuan

Mewujudkan Masyarakat Inklusif



Disusun Oleh : Siti Hanifah
Nabiela Laily

November 2023



infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development



Modul Sekolah Inklusi Perempuan

Mewujudkan Masyarakat Inklusif

Pengurus Wilayah
Fatayat NU Jawa Timur

Disusun oleh
Siti Hanifa
Nabiela Nailly

Kontributor Modul
AD Eridani
Syafira Khairani
Dewi Winarti
Ida Rochmawati

November 2023

**MODUL SEKOLAH
INKLUSI PEREMPUAN**

Penanggung jawab:
Direktur INFID
Ketua PW fatayat NU Jawa Timur

Penyusun :
Siti Hanifah
Nabiela Nailly

Penyunting
Alamsyah Djakfar

Penyelia Akhir
Wasid

Lay outer
Anillahi Ilham Akbar

KATA PENGANTAR

Masyarakat inklusif menjadi harapan ideal di tengah menguatnya fakta-fakta intoleransi dan peristiwa-peristiwa yang menodai nilai-nilai humanitas. Pimpinan Wilayah Fatayat NU Jawa Timur bersama anggota Konsorsium INKLUSI lainnya selama hampir setahun membangun budaya dan narasi, serta melakukan kerja-kerja *real* dalam memberdayakan masyarakat menebarkan nilai-nilai inklusi.

Konsorsium INKLUSI beranggotakan INFID (International NGO Forum for Indonesia Development), Maarif Institute, Perkumpulan Media Link, PW Fatayat NU Jawa Barat, PW Fatayat NU Jawa Timur, SETARA Institute, UNIKA Soegijapranata, dan Yayasan Inklusif. Konsorsium INKLUSI berfokus pada pemberdayaan kepemimpinan untuk memperkuat kebebasan beragama dan berkeyakinan serta masyarakat yang tangguh di sektor-sektor strategis utama: media massa, BUMN, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, kepemimpinan perempuan, dan sosial media. Tujuan kerja besar anggota konsorsium adalah mempromosikan kebebasan beragama dan berkeyakinan, melawan intoleransi dan ekstremisme kekerasan.

PW Fatayat NU Jawa Timur menggagas Sekolah Inklusi Perempuan sebagai satu upaya untuk meningkatkan kapasitas pemimpin perempuan organisasi keagamaan dalam menyebarkan nilai-nilai inklusi di lembaga dan masyarakat sekitarnya. Buku Modul Sekolah Inklusi Perempuan ini disediakan untuk para fasilitator sekolah inklusi perempuan yang akan mendampingi peserta sekolah Inklusi perempuan di Jawa timur dan Jawa Barat. Buku modul ini disusun dalam dua kerangka: teknis dan nonteknis. Kerangka teknis memuat langkah-langkah praktis yang harus dilakukan fasilitator selama berinteraksi dengan peserta. Hal-hal non teknis menyangkut konten materi yang akan disampaikan fasilitator maupun narasumber dalam pelatihan. Seluruh bagian dari modul ini menggunakan kerangka Gender, Disabilitas dan Sosial Inklusi (GEDSI) sebagai perspektif nilai yang akan dikembangkan, di samping konsep *rahmatan lil alamin* sebagai basis normatif yang hendak diaplikasikan.

Modul Sekolah Inklusi Perempuan ini terdiri atas delapan bab dengan pembahasan yang spesifik. Bab pertama, berisi pendahuluan yang memaparkan Latar belakang modul ini disusun, pentingnya GEDSI dalam mewujudkan Masyarakat Inklusi, Intoleransi, Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan: Ancaman Keamanan Insani dan Sekolah Inklusi Sebagai Sebuah Ikhtiar. Bab kedua berisi tentang Pengguna Modul, fasilitator Pelatihan, Kurikulum, pendekatan Pelatihan, keterbatasan modul dan jadwal sekolah Inklusif. Bab ketiga merupakan inti dari modul ini yang memuat langkah praktis TOT yang terdiri atas 10 sesi. Rincian sesi sebagai berikut; Perkenalan dan orientasi Pelatihan, Pemetaan harapan dan kekhawatiran serta kontrak belajar, memaparkan kontrak belajar sebagai bagian penting pra pelatihan. Mengenal Konsep *Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)*, GEDSI dalam Perspektif Islam, Mengenal konsep Intoleransi, Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan sebagai Ancaman Inklusi Sosial, Implementasi Konsep Islam *Rahmatan Lil `Alamin* untuk Membangun Masyarakat Inklusi, Membaca Komunitas dengan *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, Pengorganisasian Masyarakat untuk Penguatan Inklusi Sosial, Refleksi Sekolah Inklusi Perempuan, Rencana Tindak Lanjut. Bab empat sebagai Penutup dari rangkaian modul ini.

PW Fatayat NU Jawa Timur menyampaikan terima kasih kepada INFID dan anggota Konsorsium lainnya atas dukungan positifnya mewujudkan ide Sekolah Inklusi Perempuan. Penghargaan tak terhingga kami sampaikan pada tim penulis: Siti Hanifah dan Nabiela Naili yang bersedia mencurahkan waktu dan pemikirannya menyusun modul ini hingga tersaji dengan sempurna dan siap diaplikasikan di Sekolah Inklusi Perempuan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi secara positif secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan modul ini.

Melalui Modul Sekolah Inklusi Perempuan ini, PW Fatayat NU Jawa Timur berharap dapat menguatkan, meningkatkan kapasitas serta memberdayakan para pemimpin perempuan lembaga keagamaan dalam menebarkan nilai-nilai inklusi dengan menggunakan perspektif GEDSI dan *Islam rahmatan lil alamin*. Pada akhirnya, komunitas masyarakat inklusi yang dicita-citakan secara perlahan dapat diwujudkan melalui kerja bersama anggota konsorsium.

Surabaya, 29 September 2023

Dewi Winarti

PW Fatayat NU Jawa Timur

Daftar Istilah

ISTILAH	PENJELASAN
Andragogi	Adalah sebuah proses untuk melibatkan peserta didik dewasa ke dalam suatu struktur pengalaman belajar.
Gender	Adalah istilah dan konsep yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai konstruksi sosial, budaya dan pemahaman atas manusia berjenis kelamin perempuan dan laki-laki
Ekstremisme Kekerasan	Ekstremisme adalah paham atau keyakinan yang ekstrim atau berlebihan; tidak hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga ras, ideologi politik, atau perkumpulan tertentu. Ekstremisme kekerasan adalah tindakan kekerasan yang didorong atas atau dihubungkan dengan paham atau keyakinan ekstrem; sebuah keyakinan dan/ atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrim dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme. ¹
Feminisme	Adalah sebuah aliran pemikiran dan Gerakan sosial, politik, dan ideologi yang bertujuan memperjuangkan hak-hak perempuan dengan menetapkan kesetaraan pada aspek politik, ekonomi, pribadi dan sosial dari kedua jenis kelamin
Intoleransi	Sikap dan tindakan yang bertujuan untuk menghalangi, melawan, atau menyangkal hak-hak dasar warga negara yang dijamin Pancasila dan UUD 1945, terutama terhadap kelompok yang berbeda dan tidak disukai karena alasan dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, dan identitas lain yang dilindungi.
Inklusif	Berasal dari Bahasa Inggris yang berarti mengajak atau mengikutsertakan. Sikap inklusif merujuk pada usaha untuk menempatkan diri ke dalam sudut pandang orang lain dalam memahami suatu hal atau permasalahan. Sementara sifat inklusif merujuk pada gambaran masyarakat yang memiliki wawasan terbuka pada keragaman identitas dan mampu menerima dan mudah berinteraksi dengan orang yang berbeda.

1 Lkis.or.id, “Ekstremisme Kekerasan (Violent Extremism),” www.lkis.or.id, diakses 28 Oktober 2023, <https://lkis.or.id/2021/10/26/ekstremisme-kekerasan-violent-extremism/#:~:text=1%20Sangat%20keras%20menuntut%20perubahan%20%28Undang-undang%2C%20pemerintahan%29%20%28KBBi%29,drastis%3B%20sikap%20ekstrem%20dalam%20aliran%20politik%20%28Kemendikbud%2C%202016d%29>

Keamanan Insani	Konsep keamanan non-tradisional yang berfokus pada keamanan manusia dan komunitas dari ancaman-ancaman yang beragam. Keamanan insani meliputi aspek-aspek jasmani, mental, spiritual, politik, sosial, lingkungan, ekonomi, militer dan budaya yang mempengaruhi keselamatan, martabat, dan kesejahteraan manusia. Keamanan insani berkembang pasca Perang Dingin sebagai alternatif dari konsep keamanan tradisional yang hanya berkonsentrasi pada ancaman militer
<i>Mubadalah</i>	Kesalingan, bersifat timbal balik diantara dua pihak, sebuah konsep pembebasan perempuan dan kesetaraan dan keadilan gender dalam perspektif Islam dengan menggunakan pendekatan kesalingan, bahwa apa yang baik untuk laki-laki juga akan baik untuk perempuan.
Radikalisme	Upaya membongkar sistem yang sudah mapan, yang sudah ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan. Radikalisme merupakan tindakan kekerasan, misalnya anti Pancasila, anti NKRI, anti kebhinekaan, dan anti toleransi, sehingga semua orang yang berbeda dengannya dianggap salah
<i>Rahmatan Lil Alamin</i>	Cinta kasih bagi seluruh alam. Makna dari <i>rahmatan lil alamin</i> ini mengajarkan umat Muslim untuk memiliki sikap yang penuh kasih sayang, belas kasihan, dan kebaikan terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah. Tidak hanya terbatas pada sesama manusia, tetapi juga kepada hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar. Konsep ini mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dan keseimbangan dalam hubungan antara manusia dengan alam semesta.
<i>Sunnatullah</i>	Ketetapan Tuhan, adalah sebuah konsep dalam agama Islam yang merujuk pada aturan-aturan alam yang berlaku dan teratur dalam ciptaan Allah SWT. Konsep ini mengajarkan bahwa ada hukum-hukum alam yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, termasuk fenomena alam, kehidupan manusia, dan sebagainya
Terorisme	Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Daftar Singkatan

SINGKATAN	PENJELASAN
ABCD	<i>Asset Based Community Development</i> (Pengembangan Komunitas Berbasis Aset), sebuah pendekatan pembangunan di komunitas berbasis pada aset yang sudah dimiliki komunitas
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CO	<i>Community organizer</i> (pendamping komunitas), seseorang yang bekerja untuk melakukan pengorganisasian di komunitas untuk mencapai tujuan tertentu
GEDSI	<i>Gender Equality, Disability and Social Inclusion</i> (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial), sebuah pendekatan untuk memastikan kesetaraan gender, pelibatan bermakna kelompok disabilitas untuk mewujudkan inklusi sosial.
INFID	International NGO Forum for Indonesia Development
PRA	<i>Participatory Rural Appraisal</i> , Kajian Desa secara Partisipatif, sebuah pendekatan yang digunakan oleh organisasi non pemerintah untuk menggali pemahaman, opini, dan pengetahuan masyarakat desa dalam perencanaan dan pengelolaan program pembangunan desa
ODHA	Orang dengan HIV/AIDS
ODGJ	Orang dengan Gangguan Jiwa
OYPMK	Orang Yang Pernah Mengalami Kusta
PW Fatayat NU	Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama
RAN PE	Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan yang mengarah pada Terorisme
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar Istilah	ii
Daftar Singkatan	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Pentingnya GEDSI dalam Mewujudkan Masyarakat Inklusi	2
C. Intoleransi, Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan: Ancaman Keamanan Insani	3
D. Sekolah Inklusi Perempuan sebagai Sebuah Ikhtiar	5
BAB II CARA MENGGUNAKAN MODUL	7
A. Pengguna Modul	8
B. Fasilitator Pelatihan	8
C. Kurikulum	8
D. Pendekatan Pelatihan	11
E. Keterbatasan Modul	12
F. Jadwal Sekolah Inklusif Perempuan	12
BAB III MODUL PELATIHAN	15
Sesi 1: Perkenalan dan Orientasi Pelatihan	16
Sesi 2: Pemetaan Harapan & Kekhawatiran dan Kontrak Belajar	17
Sesi 3: Mengetahui Konsep Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)	18
Sesi 4: GEDSI dalam Perspektif Islam	25
Sesi 5: Mengetahui konsep Intoleransi, Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan sebagai Ancaman Inklusi Sosial	34
Sesi 6: Implementasi Konsep Islam Rahmatan Lil `Alamin untuk Membangun Masyarakat Inklusi	42
Sesi 7: Membaca Komunitas dengan Participatory Rural Appraisal (PRA)	48
Sesi 8: Pengorganisasian Masyarakat untuk Penguatan Inklusi Sosial	56
Sesi 9: Refleksi Sekolah Inklusi Perempuan	61
Sesi 10: Rencana Tindak Lanjut	63
BAB IV PENUTUP	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dibangun dengan kekayaan ragam budaya, agama, suku, etnis, golongan dan Bahasa sehingga *founding father* memilih *Bhinneka Tunggal Ika*, berbeda-beda tetapi tetap satu sebagai slogan bangsa. Slogan ini disematkan dalam Garuda Pancasila, sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan sebagian kelompok saja. Keragaman ini sebagai anugerah jika dapat dikelola dengan baik namun sekaligus memiliki kerentanan sebagai perpecahan.

Dalam decade terakhir, Indonesia menghadapi tantangan keberagaman, baik agama, suku, pilihan politik, gender. Kelompok-kelompok yang dianggap berbeda dengan masyarakat pada umumnya banyak mengalami diskriminasi, marginalisasi dan kekerasan. Sikap menolak perbedaan menjadi ancaman nyata hingga saat ini. Wujud penolakan ini berupa sikap intoleransi yang jika dibiarkan akan berkembang ke arah kekerasan.

Di sisi lain, Gerakan ekstremisme kekerasan dan terorisme tengah menjadi keprihatinan global. Berbagai upaya dilakukan, baik skala makro maupun mikro, baik di level kebijakan maupun intervensi langsung ke masyarakat tengah digalakkan sebagai upaya menguatkan inklusivitas, mencegah terjadinya konflik dan menjaga perdamaian.

Sekolah Inklusi Perempuan yang digagas atas kerjasama PW Fatayat NU Jawa Timur dengan INFID adalah bagian dari ikhtiar untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif. Modul ini menggunakan perspektif Islam untuk menyiapkan para tokoh agama maupun penggerak lainnya memiliki argumentasi keagamaan dalam upayanya mengimplementasikan modul ini.

B. Tujuan penulisan modul, tujuan pelatihan dan outcome yang diharapkan dari pelatihan

Modul ini dipersiapkan agar lebih banyak aktor perempuan dari organisasi Islam yang mampu memperkuat dan mendorong hadirnya kepemimpinan perempuan yang memperjuangkan inklusivitas, perdamaian dan toleransi.

Tujuan spesifik Pelatihan ini antara lain :

1. Peserta memahami dan menyadari urgensi penerapan nilai-nilai inklusi, perdamaian dan toleransi bagi komunitas yang dipimpinnya
2. Peserta mampu mengidentifikasi bagaimana menerapkan nilai-nilai inklusi melalui peran kepemimpinan mereka dan organisasi/komunitas yang dipimpinnya
3. Peserta mampu menginisiasi gerakan penyebaran nilai inklusi perdamaian dan toleransi di lingkungan atau komunitas yang dipimpinnya
4. Parapeserta mampu meningkatkan kapasitas dan memperkuat kepemimpinan untuk mempromosikan moderasi beragama dan kebebasan beragama

Outcome

1. Adanya perubahan paradigma dan pengetahuan inklusif pemimpin agama perempuan
2. Peningkatan kapasitas pemimpin agama perempuan sebagai agen perubahan inklusif

3. Peserta mampu menjadi pelatih bagi kelompok perempuan dalam sekolah inklusif perempuan

C. Pentingnya GEDSI dalam Mewujudkan Masyarakat Inklusif

Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) sudah dipraktikkan hampir di seluruh dunia untuk tujuan inklusi sosial dan keadilan yang menyeluruh. *Outcome* dari implementasi GEDSI adalah meningkatkan jaminan kesempatan kepada setiap individu, termasuk yang terpinggirkan, terhadap pemenuhan hak asasi dan hak sebagai warga negara. Selain itu, implementasi GEDSI juga mendorong pemberantasan terhadap kemiskinan, keterpinggiran, diskriminasi, rasa tidak aman, dan ketakutan, serta perbedaan perlakuan.

GEDSI akan menjadi kerangka kerja dalam implementasi modul ini dengan memastikan setiap tahapan sesi memperhatikan komponen-komponen utama sebagai berikut:¹

1. **Kesetaraan Gender:** Memastikan kesetaraan hak, kesempatan, dan perlakuan bagi orang-orang dari semua jenis kelamin, termasuk perempuan, laki-laki, dan individu non-biner.
2. **Inklusi Sosial:** Mempromosikan partisipasi dan keterlibatan semua individu dan kelompok dalam masyarakat, tanpa memandang latar belakang, identitas, atau status mereka. Hal ini termasuk mengatasi masalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, diskriminasi, dan marginalisasi.
3. **Inklusi Disabilitas:** Berfokus pada hak-hak dan kebutuhan para penyandang disabilitas, dan bekerja untuk menciptakan masyarakat yang inklusif yang memberikan kesempatan dan akses yang sama terhadap layanan, infrastruktur, dan sumber daya untuk semua individu.
4. **Inklusi Kelompok Rentan:** GEDSI bertujuan untuk mendukung dan memberdayakan berbagai kelompok rentan, seperti anak-anak, remaja, lansia, individu dengan pendapatan rendah, dan masyarakat terpinggirkan lainnya, dengan memenuhi kebutuhan dan tantangan khusus mereka.
5. **Ketahanan dan Keberlanjutan:** GEDSI diterapkan pada berbagai isu ketahanan dan keberlanjutan sosial, seperti keamanan, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, agama, sanitasi, air, dan perubahan iklim, dengan fokus pada kelompok-kelompok rentan.
6. **Kemitraan dan Kolaborasi:** GEDSI menekankan pentingnya kolaborasi dan kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan individu, untuk mencapai pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan.
7. **Akses terhadap Layanan dan Sumber Daya:** GEDSI bekerja untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap layanan, sumber daya, dan kesempatan yang penting, tanpa memandang jenis kelamin, disabilitas, atau latar belakang sosial mereka.
8. **Penghargaan terhadap Keberagaman:** GEDSI mengakui dan menghargai keragaman individu dan komunitas, dan mempromosikan gagasan bahwa

¹ Disarikan dari Melani Abdulkadir-Sunito, dkk, *Ruang Hidup dan Penghidupan Analisis dengan Perspektif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) Sebuah Panduan*, (The Samdhana Institute, Juli 2019), Leya Catleya Soeratman, *Acuan pelatihan Pengarusutamaan GEDSI Dalam Program Konsorsium Inklusi INFID* (Maret 2022)

setiap individu memiliki kekuatan dan kontribusi yang unik untuk diberikan kepada masyarakat.

Implementasi pengarusutamaan GEDSI akan memupuk tumbuhnya empat perubahan baik. *Pertama*, meningkatkan jaminan kesempatan kepada setiap individu, termasuk yang terpinggirkan, terhadap pemenuhan hak asasi manusia, dan hak sebagai warga negara. *Kedua*, mendorong pemberantasan terhadap kemiskinan, keterpinggiran, diskriminasi, rasa tidak aman, ketakutan, dan perbedaan perlakuan. Semua jenis eksklusi sosial tersebut menjadi alasan atas lahirnya strategi baru GEDSI dalam mengatasi kesenjangan sosial yang kian lebar. *Ketiga*, meningkatkan peluang lahirnya gerakan inklusi sosial demi keadilan sosial yang saling berkaitan, menyeluruh, utuh, dan berkelanjutan. Pelibatan banyak isu seperti gender, disabilitas, SARA, ekonomi, dan lainnya akan meluaskan jejaring inklusi sosial. *Keempat*, memperlebar akses dan kesempatan bagi semua orang terutama kelompok rentan untuk terlibat, memanfaatkan, dan memantau hasil-hasil pembangunan secara setara.²

D. Intoleransi, Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan: Ancaman Keamanan Insani

Intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan dianggap sebagai tahapan untuk menuju terorisme. Tiga istilah tersebut harus dipahami secara tepat agar peserta dapat mengklasifikasi dan mengkategorikan sebuah kejadian di sekitarnya. Karenanya, menjelaskan definisi dari ketiganya menjadi hal yang sangat penting.

Intoleransi berarti ketidakmampuan individu atau kelompok menerima perbedaan identitas dengan kelompok lain dan memaksakan identitas kelompok lain agar sama dengannya.³ Intoleransi tidak hanya terkait agama, namun juga terkait suku, ras, pemikiran, gender dan orientasi seksual.

Radikalisme adalah pola pikir ideologis dengan kecenderungan melakukan perubahan mendasar dalam berbagai bentuk restrukturisasi dengan tujuan mengubah tatanan yang sudah ada. Gerakan radikalisme biasanya dilakukan individu atau kelompok yang berusaha mengubah sistem yang sudah berjalan dan dianggap stagnan, seperti sistem sosial, sistem politik, maupun negara.⁴ Istilah ini terus berkembang hingga sekarang, bahkan atribut kekerasan yang menempel kepada istilah ini merupakan perkembangan makna, padahal di awal penggunaannya, radikalisme tidak identik dengan kekerasan, terutama kekerasan fisik.

Ekstremisme adalah status ideologis yang dipegang oleh gerakan anti-sistem yang memandang perjuangan untuk meraih supremasi, bukan sebagai kompetisi damai namun sebagai penaklukan melalui cara menyebarkan ketakutan terhadap musuh di dalam dan di luar masyarakat. Ekstremisme tidak mengenal toleransi dan tidak mau berkompromi serta cenderung terlibat dalam militansi agresif, termasuk tindakan kriminal dan kekerasan massal. Ketika para ekstrimis berhasil memenangkan kekuasaan, mereka cenderung melakukan homogenisasi masyarakat secara

2 Ilham, "Empat Hal Penting Dari Perspektif GEDSI, Apa Saja?," *Muhammadiyah* (blog), June 11, 2022, <https://muhammadiyah.or.id/empat-hal-penting-dari-perspektif-gedsi-apa-saja/>.

3 Steve Clarke, Russell Powell, and Julian Savulescu, *Religion, Intolerance, and Conflict: A Scientific and Conceptual Investigation* (OUP Oxford, 2013), 2

4 Astrid Bötticher, Towards Academic Consensus Definitions of Radicalism and Extremism, *Perspectives on Terrorism* 11, no. 4 (2017): 75

menyeluruh, berdasarkan ideologi yang sering kali berbasis agama dengan ciri-ciri apokaliptik,⁵ sebuah paham yang percaya bahwa dunia sudah banyak kejahatan dan maksiat dan akan diganti dengan dunia baru.

Tiga hal di atas merupakan ancaman serius terhadap keamanan insani. Keamanan insani adalah konsep keamanan non-tradisional yang berfokus pada keamanan manusia dan komunitas dari ancaman jasmani dan non-jasmani. Ancaman non-jasmani berarti termasuk di dalamnya ancaman budaya, mental, spiritual, ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan yang dapat mengurangi martabat manusia. Konsep keamanan insani menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Potensi ancaman terhadap keamanan insani semakin menguat ketika fakta keragaman sosial dikembangkan secara intoleran, memiliki kecondongan radikalisme, serta ekstremisme.

Yang menjadi korban dari tindakan intoleransi adalah kelompok marjinal, minoritas yang dianggap sebagai liyan dan sering dianggap sesat, terutama jika terkait dengan keyakinan agama dan keyakinan tertentu. Jika dibiarkan, intoleransi bisa berkembang menjadi gerakan yang radikal, dan menuju ke ekstremisme kekerasan hingga pada terorisme.

E. Sekolah Inklusi Perempuan sebagai Sebuah Ikhtiar

PW Fatayat NU Jawa Timur dan INFID merancang Sekolah Inklusi Perempuan sebagai sebuah ikhtiar untuk berkontribusi dalam upaya membangun masyarakat yang inklusi dengan melakukan penguatan kapasitas terhadap tokoh perempuan dari berbagai latar belakang organisasi Islam. Harapannya setelah mengikuti pelatihan ini mereka dapat mempraktekkan pengetahuan dan keterampilannya untuk menguatkan inklusivitas di komunitasnya masing-masing dan pada masyarakat yang lebih luas. Dengan memahami konsep GEDSI, *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, pengorganisasian, peserta mampu membumikan konsep Islam *Rahmatan Lil `alamin* sebagai bagian dari ajaran Islam untuk perlindungan dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia, termasuk hak perempuan di dalamnya.

5 Bötticher, 74

BAB II

CARA MENGUNAKAN MODUL

A. Pengguna Modul

Modul ini ditujukan sebagai panduan bagi fasilitator pelatihan Sekolah Inklusi Perempuan atau inspirasi untuk pelatihan sejenis, terutama untuk:

1. Aktivis perdamaian
2. Tokoh masyarakat
3. Tokoh agama Islam
4. Pendamping komunitas

B. Fasilitator Pelatihan

Fasilitator memiliki peran penting untuk memastikan ketercapaian tujuan pelatihan ini. Karena pelatihan didesain partisipatif dan banyak mengeksplorasi pengalaman peserta sebagai sumber belajar, maka penting bagi fasilitator memiliki beberapa kriteria di bawah ini:

- a. Menghargai perbedaan, memiliki perspektif gender dan inklusif.
- b. Memiliki pengalaman dalam memfasilitasi pelatihan
- c. Memiliki keterampilan mendengar yang baik
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai terkait materi-materi dalam sesi modul ini.
- e. Mendorong partisipasi peserta untuk terlibat aktif dalam proses pelatihan dengan berbagi pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan lainnya.
- f. Memiliki sensitivitas isu-isu Geds, intoleransi dan keberagaman
- g. Memiliki kemampuan yang baik dalam mitigasi resiko dalam pembelajaran
- h. Mampu melakukan adaptasi saat situasi dan kondisi di tempat pelatihan berbeda dari yang sudah direncanakan dalam modul, seperti tiba-tiba listrik mati sehingga tidak memungkinkan menampilkan presentasi, dll.
- i. Memastikan suasana pelatihan kondusif dan nyaman.
- j. Mampu mengakomodir kebutuhan spesifik peserta untuk memastikan tercapainya tujuan pelatihan, seperti fasilitas untuk kelompok disabilitas agar dapat mengakses lokasi pelatihan dengan aman, ukuran font dalam presentasi ramah terhadap peserta yang memiliki keterbatasan penglihatan, dll.
- k. Tidak pernah menjadi pelaku dalam kasus intoleransi, radikalisme, ekstremisme kekerasan dan kekerasan seksual.

C. Kurikulum

SESI	TUJUAN	MATERI	DURASI	METODE
Perkenalan dan Orientasi Pelatihan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengenal lebih dalam setiap peserta dengan mengetahui latar belakang mereka untuk membangun rasa saling percaya agar tercipta kondusifitas dalam Sekolah2. Membangun dinamika kelompok peserta yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda.3. Memberikan gambaran alur pelaksanaan Sekolah Inklusi Perempuan secara komprehensif selama 3 (tiga) hari.	<ol style="list-style-type: none">1. Perkenalan2. Orientasi Pelatihan	45 menit	Permainan mencari simbol diri. Presentasi

Sesi 2: Pemetaan Harapan & Kekhawatiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami harapan peserta terhadap penyelenggaraan Sekolah Inklusi Perempuan. 2. Memahami kekhawatiran peserta selama pelaksanaan Sekolah Inklusi Perempuan. 3. Peserta menyepakati kontrak belajar agar harapannya dapat dicapai dan kekhawatirannya dapat diantisipasi selama kegiatan berlangsung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Harapan dan Kekhawatiran 2. Menyepakati Kontrak Belajar 	15 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menulis 2. Curah pendapat (<i>brainstorming</i>)
Sesi 3: Mengenal Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami konsep GEDSI sebagai sebuah pendekatan untuk membangun masyarakat inklusif. 2. Peserta mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan gender. 3. Peserta mampu mempraktekkan analisis gender dalam simulasi menganalisis contoh kasus. 4. Peserta mampu memahami konsep konsep dasar tentang kelompok rentan dan minoritas serta tantangan utama yang mereka hadapi . 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal Konsep Gender; 2. Mengenal Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender; 3. Mengenal Alat Analisis Gender 4. Mengenal Konsep GEDSI. 	120 menit	<p>Curah pendapat (<i>brainstorming</i>)</p> <p>Presentasi</p> <p>Pemutaran Film</p> <p>Diskusi</p>
Sesi 4: GEDSI dalam Perspektif Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami bahwa Kesetaraan Gender adalah bagian dari perjuangan Islam 2. Peserta memahami konsep Islam Wasathiyah dan <i>Maqashid Asy Syariah</i> sebagai konsep implementasi GEDSI untuk mewujudkan inklusi sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami bahwa Kesetaraan Gender adalah bagian dari perjuangan Islam 2. Peserta memahami konsep Islam Wasathiyah sebagai konsep implementasi GEDSI untuk mewujudkan inklusi sosial. 3. Peserta memahami konsep <i>Maqashidus syariah</i> sebagai basis gerakan sosial, termasuk bagaimana memperlakukan kelompok disabilitas 	180 menit	<p>Brainstorming</p> <p>Presentasi</p> <p>Tanya Jawab</p>

Sesi 5: Mengenal konsep Intoleransi, Radikalisme Ekstremisme Kekerasan dan terorisme sebagai ancaman Inklusivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami istilah intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan, dan terorisme, serta perbedaan istilah-istilah tersebut. 2. Peserta memahami bagaimana mengidentifikasi gejala-gejala intoleransi, radikalisme, ekstremisme kekerasan, dan terorisme di lingkungannya. 3. Peserta memahami tahapan proses dari intoleransi menjadi terorisme. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep dan karakteristik intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme kekerasan 2. Radikalisasi dan tahapan menuju ekstremisme kekerasan. 	120 menit	Curah pendapat Presentasi Bermain
Sesi 6: Implementasi Konsep <i>Rahmatan Li al-`Alamin</i> untuk membangun Masyarakat Inklusif	Peserta memahami konsep Islam <i>rahmatan li al-`alamīn</i> yang aplikatif untuk membangun masyarakat inklusif	Konsep <i>Rahmatan Lil `alamin</i> dan bagaimana mengimplementasikannya dalam membangun masyarakat inklusif	120 menit	Curah pendapat Presentasi Narasumber Tanya Jawab
Sesi 7: Memahami Komunitas dengan <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami pengertian, prinsip prinsip, teknik dan instrumen <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i> sebagai suatu pendekatan dan metode pengkajian partisipatif serta bagaimana fasilitator bersikap dalam memfasilitasi PRA. 2. Peserta memahami cara mempraktikkan teknik teknik <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i> dalam upaya promosi nilai-nilai inklusi di komunitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal konsep, prinsip prinsip, teknik <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i> dan sikap serta perilaku fasilitator PRA. 2. Teknik – teknik <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i> 	120 menit	Game <i>Find & Match</i> (Temukan dan Cocokkan) Presentasi Diskusi Kelompok
Sesi 8: Pengorganisasian Masyarakat untuk Membangun masyarakat Inklusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami konsep pengorganisasian masyarakat, dan prinsip-prinsip pelaksanaannya. 2. Peserta memahami tahapan pengorganisasian masyarakat untuk membangun masyarakat inklusif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentingnya pengorganisasian Masyarakat untuk Membangun Masyarakat yang Inklusif 2. Prinsip-prinsip dan Tahapan Pengorganisasian Masyarakat 3. Mengenal pendekatan ABCD. 	120 menit	Game Puzzle (Mengurutkan) Presentasi Diskusi Kelompok Simulasi pengorganisasian

Sesi 9 Refleksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memiliki komitmen untuk mengaplikasikan pengetahuannya di komunitas masing-masing untuk mewujudkan masyarakat inklusif. 2. Peserta memberikan masukan kepada penyelenggara untuk perbaikan kualitas Sekolah Inklusi Perempuan 	Refleksi	30 menit	Testimoni
Sesi 10: Rencana Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mampu Menyusun Rencana Tindak Lanjut pasca Sekolah Inklusi Perempuan 2. Peserta memiliki komitmen untuk melaksanakan Rencana Tindak Lanjut setelah Sekolah Inklusi Perempuan ini selesai 	Rencana Tindak Lanjut	10 menit	Menulis

D. Pendekatan Pelatihan

Sekolah Inklusi Perempuan dijalankan melalui pelatihan selama 3 hari atau 24 jam. Pelatihan dijalankan dengan menggunakan pendekatan andragogi sebuah proses pendidikan orang dewasa untuk mengembangkan daya pikir kritis peserta dalam melihat masalah yang ada di sekitarnya dan menemukan kapasitas untuk mengatasinya serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam modul ini, materi yang disusun serta metode pembelajaran akan lebih banyak menggali pengalaman peserta sebagai sumber belajar.

Dalam pendekatan feminisme, pengalaman perempuan adalah sah sebagai sumber pengetahuan. Pokok pembelajaran dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta untuk membangun dan memperkuat inklusi sosial di wilayahnya masing-masing. Menggabungkan pengalaman peserta dengan teori agar peserta mendapatkan gambaran bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan selama proses dapat diimplementasikan di komunitasnya.

Paulo Freire menyebutkan bahwa pendidikan pembebasan adalah proses membangkitkan kesadaran kritis peserta didik, dan kemudian dengan kekritisannya dapat menemukan berbagai masalah yang ada di lingkungannya, kapasitas sekaligus kerentanan yang dimiliki, serta ancaman yang melingkupi kehidupannya. Serangkaian materi dalam pelatihan ini diarahkan untuk mengenali kapasitas, kerentanan, dan ancaman yang ada, sehingga peserta bisa mengetahui resiko dalam upaya membangun masyarakat yang inklusif. Pengetahuan tentang resiko tersebut menjadi modalitas untuk menyusun strategi intervensi bersama dengan masyarakat untuk membuat perubahan yang diharapkan.

Pelatihan ini juga menggunakan pendekatan pendidikan yang mampu mencapai tujuan pembelajaran seperti dirumuskan UNESCO: *to know, to do, to be, dan to live together*. Keempat tujuan ini dapat digunakan sebagai panduan mengarahkan pendidikan inklusi perempuan;

- *To know* menjelaskan bahwa peserta harus berusaha untuk memahami pengetahuan yang diterima selama pelatihan. Pengetahuan bisa berasal dari fasilitator maupun dari peserta lainnya.
- *To do*: Peserta diharapkan memiliki keterampilan yang memadai untuk melakukan

berbagai tindakan, seperti berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan memecahkan masalah, sebagai tujuan dari diselenggarakannya pelatihan ini.

- *To be*: Peserta diharapkan memiliki kepribadian yang berkualitas, seperti memiliki rasa percaya diri, empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial untuk menjadi “*changemaker*” atau penggerak demi mewujudkan masyarakat yang inklusi.
- *To live together*: Peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk hidup bersama dengan orang lain dalam masyarakat yang beragam, seperti memiliki pemahaman tentang hak asasi manusia, keberagaman budaya, dan perdamaian.

E. Keterbatasan Modul

Dalam kaidah penyusunan modul, agar dapat meningkatkan motivasi belajar peserta, karakteristik modul harus memenuhi unsur-unsur *self instruction* (memungkinkan seseorang belajar mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain), *self contained* (seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan harus termuat dalam modul), *stand alone* (modul tidak tergantung pada media/bahan ajar lain, atau tidak harus digunakan bersama dengan bahan ajar/media lain), adaptif (menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta fleksibel digunakan untuk situasi apapun) serta *user friendly* (mudah dipahami oleh pemakainya).

Modul Sekolah Inklusi Perempuan yang diselenggarakan oleh INFID bekerjasama dengan PW Fatayat NU Jawa Timur ini disusun untuk memberikan landasan bagi tokoh agama Islam perempuan mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusi dengan perempuan sebagai subjek perubahan.

Penyusunan modul ini telah diupayakan untuk memenuhi karakteristik modul sebagaimana di atas, namun dalam prakteknya modul ini memiliki beberapa keterbatasan:

1. Materi pembelajaran yang ada, tidak semuanya bisa dimasukkan dalam modul mengingat kebutuhan modul ini dapat digunakan oleh para tokoh perempuan organisasi berbasis keagamaan Islam maupun komunitas lainnya yang ingin mengembangkan masyarakat yang inklusi dan berkeadilan gender berdasarkan nilai-nilai Islam.
2. Media maupun metode belajar yang ada dalam modul ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan, seperti mempertimbangkan ada metode maupun media yang lebih efektif untuk menyampaikan materi serta lebih mempermudah peserta memahami materi.
3. Modul ini didesain untuk pelatihan tatap muka, bukan pelatihan daring. Karenanya, jika akan dilakukan secara daring, maka ada beberapa metode dan media belajar yang harus diubah/disesuaikan agar tujuan pembelajaran dapat dapat tercapai.

E. Jadwal Sekolah Inklusif Perempuan

Jam	Hari I	Hari II	Hari III
08.30 - 09.00	Registrasi Peserta & Pre Tes	Review Materi Hari I	Review Materi Hari II

09.00 - 09.15	Pembukaan	Sesi 5: Mengenal konsep Intoleransi, Radikalisme & Ekstremisme Kekerasan	Sesi 7: Memahami Komunitas dengan <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i>
09.15 - 10.00	Sesi 1: Perkenalan dan Orientasi Pelatihan		
10.00 - 10.15	Sesi 2: Pemetaan Harapan & Kekhawatiran & Kontrak Belajar		
10.15 - 10.30	Break	Break	Break
10.30 - 12.30	Sesi 3: Mengenal <i>Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)</i> .	Lanjutan	Lanjutan
12.30 - 13.30	Istirahat	Istirahat	Istirahat
13.30 - 14.30	Sesi 4: GEDSI dalam Perspektif Islam	Sesi 6: Implementasi Konsep <i>Rahmatan Lil Alamin</i> untuk membangun Masyarakat Inklusif	Sesi 8: Pengorganisasian Masyarakat
14.30 - 16.30			Sesi 9: Refleksi Sesi 10 Rencana Tindak Lanjut
16.30 - 17.00	Pendalaman	Pendalaman	Post Tes dan Penutupan

BAB III

MODUL PELATIHAN

SESI 1: Perkenalan, Orientasi Pelatihan

Gambaran Umum

Perkenalan adalah bagian penting untuk peserta saling mengenal latar belakang peserta lainnya, baik organisasi, pendidikan, keluarga, aktifitas, hal-hal yang disukainya, atau lainnya. Perkenalan dimaksudkan untuk membangun dinamika diantara peserta yang berasal dari latar belakang berbeda agar terbangun kedekatan dan rasa saling percaya dan merasa nyaman membagi pengalaman personalnya saat mengikuti Sekolah Inklusi Perempuan ini.

Tujuan

1. Mengetahui lebih dalam setiap peserta dengan mengetahui latar belakang mereka untuk membangun rasa saling percaya agar tercipta kondusifitas dalam Sekolah.
2. Membangun dinamika kelompok peserta yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda.
3. Memberikan gambaran alur pelaksanaan Sekolah Inklusi Perempuan secara komprehensif selama 3 (tiga) hari.

Pokok Bahasan

1. Perkenalan
2. Orientasi Pelatihan

Metode

- Permainan mencari simbol diri.
- Presentasi

Waktu

40 menit

Alat dan Media

1. Benda-benda di sekitar peserta (atau peserta bisa diminta untuk membawa dari rumah, benda yang dianggap merepresentasikan dirinya)
2. Proyektor
3. Presentasi tentang Orientasi Pelatihan

Langkah-Langkah Fasilitasi

a. Perkenalan

1. Fasilitator menjelaskan tujuan dari sesi perkenalan dan meminta peserta untuk mencari benda disekitarnya dalam waktu 2 (dua) menit yang merepresentasikan dirinya.
2. Peserta diminta untuk menyebutkan nama, organisasi, pendidikan dan mengapa memilih benda tersebut sebagai representasi dirinya. Masing-masing memiliki waktu bicara 1 (satu) menit.
3. Setelah semua peserta dan fasilitator mengenalkan dirinya, fasilitator menjelaskan tentang alur pelatihan.

b. Orientasi Pelatihan

1. Fasilitator menjelaskan latar belakang, tujuan output serta alur pelatihan, serta metode yang digunakan untuk masing-masing sesi.
2. Fasilitator mempersilahkan peserta jika ada yang perlu ditanyakan.

Catatan Fasilitator

- Fasilitator sebaiknya menyiapkan slide presentasi untuk memudahkan menjelaskan alur tersebut.

SESI 2:

Pemetaan Harapan & Kekhawatiran dan Kontrak Belajar

Gambaran Umum

Peserta Sekolah Inklusi Perempuan ini berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Untuk memastikan sekolah berjalan sebagaimana yang direncanakan, penting untuk memetakan harapan dan kekhawatiran setiap peserta. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan sekolah ini sejalan dengan tujuan peserta terlibat dalam kegiatan. Di akhir sesi pada saat refleksi, fasilitator dapat melihat lagi apakah harapan peserta telah terpenuhi selama mengikuti sekolah. Selain itu, juga penting untuk mengantisipasi kekhawatiran-kekhawatiran yang akan timbul saat pelaksanaan, seperti peserta datang terlambat jika panitia tidak menyediakan penginapan selama kegiatan, gangguan kesehatan atau lainnya.

Tujuan

1. Memahami harapan peserta terhadap penyelenggaraan Sekolah Inklusi Perempuan.
2. Memahami kekhawatiran peserta selama pelaksanaan Sekolah Inklusi Perempuan.
3. Peserta menyepakati kontrak belajar agar harapannya dapat dicapai dan kekhawatirannya dapat diantisipasi selama kegiatan berlangsung.

Pokok Bahasan

1. Pemetaan Harapan & Kekhawatiran
2. Menyepakati Kontrak Belajar

Metode

Menulis

Waktu

20 menit

Alat dan Media

1. Plano
2. Spidol
3. Sticky Note 2 warna

Langkah-Langkah Fasilitasi

1. Fasilitator menjelaskan tentang tujuan dari sesi ini. Fasilitator membagikan sticky note di masing-masing meja 2 (dua) warna dan meminta peserta untuk menuliskan harapan mereka terhadap training di kertas warna hijau dan kekhawatiran di kertas warna merah muda. Fasilitator telah menyediakan plano untuk menempel harapan dan kekhawatiran.
2. Setelah semua peserta menempelkan jawabannya, fasilitator mengklasifikasi jawaban peserta berdasarkan kemiripan harapan dan kekhawatiran.
3. Selanjutnya fasilitator menanyakan apa yang harus dilakukan agar harapan tersebut dapat terwujud dan kekhawatiran itu bisa diantisipasi?
4. Jawaban peserta ditulis dalam plano sebagai Kontrak Belajar. Fasilitator dapat menawarkan usulan-usulan lainnya agar sekolah Inklusif perempuan terselenggara sesuai dengan harapan.



SESI 3:

Mengenal Konsep Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)

Gambaran Umum

Penerapan pendekatan GEDSI adalah sebuah ikhtiar untuk memastikan semua orang dari berbagai latar belakang, termasuk perempuan dan ragam gender lainnya, kelompok disabilitas dan kelompok lain yang masih mengalami marginalisasi (peminggiran) mendapatkan peluang sama dalam mengakses, menggunakan, berkontribusi, mempengaruhi, dan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Selama ini pembangunan hanya mengacu pada masyarakat pada umumnya, tanpa memperhatikan kelompok-kelompok rentan yang memiliki kebutuhan spesifik untuk dapat berpartisipasi, mendapatkan akses, kontrol, dan manfaat dari pembangunan.¹

1 Gender Equality Disability and Social Inclusion (GEDSI) Strategy Prepared for the Cyber and Critical Tech Cooperation Program, Australian Government, 2021, 4.

Bias dan praktik diskriminatif ini ditemukan dimana program pembangunan dilakukan, sehingga banyak kelompok marginal yang mengalami ketertinggalan. Situasi ini bertentangan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang memberikan penekanan prinsip *no one left behind* (tak seorangpun tertinggal dalam pembangunan). Lensa GEDSI digunakan untuk mencegah dampak buruk yang berkepanjangan, pengucilan, dan marginalisasi lebih lanjut terhadap kelompok rentan, serta untuk memajukan hak-hak mereka, membuka akses, partisipasi dan manfaat yang adil.

Memahami pendekatan GEDSI adalah prasyarat untuk penguatan kohesi sosial dan mencegah berkembangnya intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Memahami GEDSI adalah proses internalisasi nilai penghargaan terhadap perbedaan, pengakuan atas kesetaraan yang diberikan oleh Tuhan sejak manusia dilahirkan, serta tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjadi teladan bagi sesama dengan memberikan manfaat seluas-luasnya untuk makhluk lainnya. Sesi ini bertujuan untuk memberikan dan membangun perspektif bagi peserta dalam membaca realitas sosial yang ada di sekitar peserta.

Tujuan

1. Peserta memahami konsep GEDSI sebagai sebuah pendekatan untuk membangun masyarakat inklusif.
2. Peserta mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan bentuk diskriminasi lainnya seperti *ageisme*, *classism*, dan *ableism*.
3. Peserta mampu mempraktekkan analisis gender, disability dan sosial inklusi dalam simulasi menganalisis contoh kasus.
4. Peserta mampu memahami konsep-konsep dasar tentang kelompok rentan dan minoritas serta tantangan utama yang mereka hadapi.

Pokok Bahasan

1. Mengenal Konsep Gender
2. Mengenal Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender, bentuk diskriminasi lainnya seperti *ageisme*, *classism*, dan *ableism*.
3. Mengenal Alat Analisis Gender
4. Mengenal Konsep GEDSI

Metode

- Curah pendapat (*brainstorming*)
- Presentasi
- Permainan Jaring laba-laba
- Diskusi

Waktu

120 menit

Alat dan Media

1. Plano
2. Spidol

3. Kertas tempel (*sticky note*)
4. Laptop
5. Proyektor
6. Lembar kasus
7. Tali Rafia
8. Materi Presentasi

Langkah-Langkah Fasilitasi

1. Fasilitator menjelaskan tentang tujuan dari sesi, lalu menanyakan apa yang mereka pahami tentang GEDSI. Jika belum ada yang memahami, tanyakan apa yang peserta pahami tentang gender.
2. Fasilitator mencatat jawaban peserta terkait pemahaman mereka tentang gender dalam kertas plano.
3. Jika peserta lebih banyak yang belum memahami konsep gender, fasilitator memberikan gambaran singkat konsep gender. (*Materi terlampir*)
4. Setelah peserta memahami konsep gender, fasilitator menjelaskan konsep GEDSI, kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial. Setelah memahami konsep besarnya, fasilitator menjelaskan tentang komponen GEDSI. (*Materi terlampir*)
5. Fasilitator membuka sesi tanya jawab untuk memastikan peserta memahami konsep GEDSI.
6. Selanjutnya fasilitator menanyakan kepada peserta apa yang peserta pahami tentang bentuk-bentuk ketidakadilan gender, bentuk diskriminasi lainnya seperti *ageisme, classism, dan ableism*. Catat jawaban peserta di kertas plano. Fasilitator mengkonfirmasi bentuk-bentuk ketidakadilan gender dari jawaban tersebut.
7. Fasilitator juga menjelaskan tentang analisis gender yang biasa digunakan dalam pembangunan, yakni analisis gender *Pathway* yang terdiri dari Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat.
8. Fasilitator kemudian mengajak peserta untuk bermain jaring laba-laba. Peserta diminta berdiri melingkar dan salah satu berperan sebagai Rani berdiri di tengah. Fasilitator mulai dengan membacakan sebuah kasus (*terlampir*). Setelah kasusnya dibaca, fasilitator bertanya kepada peserta, mengapa Rani meninggal. Setiap jawaban peserta ditulis di kertas sticky note dan ditempelkan pada badan Rani, dan setiap jawaban badan Rani diikat dengan tali rafia dan ujungnya dipegang oleh pemberi jawaban, hingga banyak ikatan dan banyak tangan yang memegang tali menyerupai sebuah jaring laba-laba di badan Rani. Setelah semua peserta menjawab dan memegang tali, minta peserta untuk menarik pelan beberapa saat tali tersebut, sebelum kemudian mengendorkannya.
9. Minta Rani dan peserta lainnya untuk merefleksikan apa yang dia rasakan selama permainan terjadi. Fasilitator mempertegas kembali bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan juga mengkaji kasus dengan menggunakan analisis gender.
10. Setelah selesai fasilitator membuka ruang tanya jawab.

Catatan Fasilitator

1. Sebelum memulai sesi, fasilitator perlu memastikan tingkat pemahaman peserta terkait dengan GEDSI. Jika ternyata lebih banyak yang belum paham, maka fasilitator harus menyiapkan presentasi terkait pengenalan gender.

2. Pengenalangenderdanragamdisabilitasbisadilakukandenganmenggunakan metode brainstorming untuk membedakan seks (jenis kelamin biologis), gender (jenis kelamin social), pengenalan ragam disabilitas, intergenerasi dan kelompok marginal lainnya.

LAMPIRAN MATERI

Lembar Kasus Permainan Jaring Laba-Laba

Rani, seorang disabilitas rungu adalah gadis berusia 16 tahun. Dia sekolah di sebuah sekolah negeri yang **tidak** menyediakan fasilitas khusus untuk siswa yang memiliki keterbatasan. Ia harus bekerja keras untuk tidak ketinggalan pelajaran sekolahnya dan di rumah ibunya membimbingnya dengan penuh kesabaran dan mengupayakan apapun untuk pendidikan anaknya meski dalam kondisi kehidupan yang pas-pasan. Ayahnya pekerja serabutan, dan melarang keras ibunya untuk bekerja, karena menurutnya laki-lakilah yang harus menjadi pencari nafkah. Saat ayahnya keluar rumah, ibunya bergegas pergi ke tetangga yang membutuhkan tenaganya untuk mencuci dan menyetrিকা sehingga ia memiliki pendapatan.

Rani, selain rajin, ia juga cantik. Namun banyak temannya melakukan perundungan terhadapnya dan melecehkannya. Tidak hanya teman di sekolah, tetangganya pun banyak yang melecehkannya dan menyatakan tak akan ada yang mau dengan orang budeg. Meskipun tak bisa mendengar hinaan itu, namun dari ekspresi pelaku, dia merasakan kebencian dan trauma dengan berbagai kekerasan yang dia terima.

Suatu hari saat ayah dan ibunya pergi bekerja, seorang laki-laki tua dan teman-temannya datang ke rumahnya. Ia dibekap dan kemudian diperkosa beramai-ramai hingga dia pingsan dan mengalami pendarahan. Saat ibunya mengetahuinya, ia langsung membawanya ke klinik terdekat. Sayangnya karena tidak punya uang, akhirnya Rani tak ditangani. Petugas menyarankan agar ia mengurus terlebih dahulu BPJSnya agar bisa mengakses layanan pengobatan gratis.

Terkoyak hati ibu dan ayahnya. Akhirnya mereka terpaksa membawa pulang anaknya. Mereka merawat Rani dengan seadanya. Sebulan kemudian diketahui bahwa Rani hamil. Ia depresi, karena dikeluarkan dari sekolah karena dianggap mencemarkan nama baik sekolah. Tetangga di sekitar ia kos juga mengusir ia dan keluarganya karena dianggap membawa aib. Mereka hidup terlunta di jalanan ibukota. Mereka akhirnya hidup di bawah jembatan dan hidup sebagai pemulung. Rani meninggal saat melahirkan, meninggalkan semua derita hidup di dunia.

Catatan fasilitator:

Cerita di bawah ini mengandung unsur kekerasan. Sebelum fasilitator membacakan cerita di bawah ini, fasilitator harus memberikan kesempatan kepada peserta yang merasa tidak nyaman dan terganggu untuk menyampaikan keberatannya

PENGERTIAN GEDSI

- a. **GEDSI** adalah singkatan dari gender equality, disability and social inclusion/GEDSI
- b. **KONSEP GEDSI:** merujuk pada upaya untuk mendorong inklusi semua kelompok masyarakat yang, telah terbukti secara historis, terpinggirkan dan karenanya membutuhkan perhatian khusus, penguatan terencana yang meliputi tapi tidak terbatas pada afirmasi (diskriminasi positif) supaya pada akhirnya keadilan kesetaraan dari sisi peluang maupun tercapainya akses, partisipasi, kontrol dan penerimaan manfaat bagi semua terwujudkan
- c. **INKLUSI SOSIAL:** proses meningkatkan partisipasi dalam masyarakat, khususnya bagi orang yang tidak diuntungkan, melalui peningkatan kesempatan, akses ke sumber daya dan penghormatan terhadap pendapat dan hak asasi manusia.
- d. **EKSKLUSI SOSIAL:** sebuah fenomena multidimensional yang tidak terbatas pada keterbatasan materi seperti kemiskinan yang merupakan dimensi penting tapi bukan satu-satunya jenis dalam eksklusi ini. Simpulan: Karena di dunia ini berbagai praktik eksklusi sosial khususnya terhadap para kelompok tertentu di sini adalah kelompok rentan, marginal dan minoritas, masih banyak terjadi, maka diperlukan upaya afirmasi secara sistematis dan terstruktur untuk dapat mendorong peningkatan inklusi sosial demi keadilan kesetaraan.

KELOMPOK DALAM UPAYA GEDSI

- a. **Kelompok Rentan:** mereka yang sebenarnya bukan minoritas tapi karena satu dan dua hal maka tetap termasuk kelompok rawan dan rentan kekerasan dan diskriminasi.
- b. **Kondisi Marjinal:** sesuatu yang terjadi karena berbagai kondisi, mulai dari penolakan, stigma, dan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas atau kelompok yang memiliki kekuasaan.
- c. **Kelompok Minoritas:** kelompok yang secara angka dan proporsi memang sangat kecil dibandingkan keseluruhan populasi sampai pada titik mereka mengalami eksklusi sosial (kelompok minoritas ini bisa mencakup suku atau etnik minoritas, penganut agama atau kepercayaan lokal dan minoritas gender, Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan lansia .
- d. **Kelompok Komunitas Mikro:** kelompok yang menyandang lebih dari satu kondisi atau atribut: minoritas, marginal, dan rentan, serta atribut lain yang melekat dan dilekatkan secara sosial. Kelompok ini biasanya disebut sebagai *micro minority* atau minoritas mikro. Kelompok yang masuk lebih dari satu kategori ini mengalami lebih dari satu layer/lapis diskriminasi, kekerasan, dan penindasan. Contoh di sini adalah

perempuan miskin, penyandang disabilitas yang juga perempuan dan miskin dan lain sebagainya. Seorang penyandang disabilitas yang juga perempuan biasanya mengalami dampak negatif ganda berlipat baik sebagai perempuan miskin, penyandang disabilitas yang juga perempuan dan miskin dan lain sebagainya. Seorang penyandang disabilitas yang juga perempuan biasanya mengalami dampak negatif ganda berlipat baik sebagai penyandang disabilitas sekaligus sebagai perempuan dan juga sebagai seorang miskin.

Simpulan: Secara sosiologis, memang ada beberapa kategori kelompok-kelompok di masyarakat yang layak dan membutuhkan afirmasi dalam bentuk GEDSI.

Gender dan GEDSI

Kesetaraan gender merupakan bagian integral dari GEDSI. Meski bisa jadi didefinisikan atau dimaknai beragam, *gender equality* atau kesetaraan gender ini, umumnya dimaknai sebagai kesetaraan peluang, hak dan tanggung jawab bagi perempuan dan laki-laki, termasuk anak perempuan dan anak laki-laki.

- a. Gender: Perbedaan konstruksi sosial budaya tentang peran, fungsi, tanggung jawab, sikap dan perilaku yang diharapkan dilakukan oleh perempuan dan laki-laki di masyarakat.
- b. Jenis Kelamin (Seks): perbedaan genetik dan biologis antara laki laki dan perempuan yang merupakan pemberian alamiah dari Tuhan.
- c. Perbedaan kodrati tidak sama dengan perbedaan hasil konstruksi sosial budaya
- d. Perbedaan hasil konstruksi itu menjadi semakin bermasalah ketika berdampak pada berbagai ketidakadilan dan ketidaksetaraan.

Ketidakadilan Gender:

1. **Subordinasi:** sebuah keadaan atau perilaku sistemik dan atau keadaan struktural yang menempatkan salah satu pihak lebih rendah dibandingkan yang lainnya
2. Stereotip: Stereotip adalah pelabelan negatif yang digeneralisasikan atas salah satu jenis kelamin; bisa menimpa perempuan (memang kebanyakan perempuanlah yang mengalami ini) tapi tetap juga bisa menimpa laki-laki. Hal ini menjadi problematik karena seringkali berakibat negatif pada ranah praksis.
3. **Kekerasan:** Kekerasan di sini adalah kekerasan berbasis gender atau *gender-based violence* yang bisa berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Secara lokus, kekerasan berbasis gender bisa terjadi di ranah domestik maupun publik.
4. **Beban ganda** (*double burden*): ketimpangan atau ketidakadilan pembagian kerja dan peran atau ditimpakannya beban berlebihan atau ketimpangan beban kerja dan pembagian peran.
5. **Marginalisasi:** peminggiran berbasis gender dan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti peminggiran dari ranah publik dan lainnya.

Ada banyak upaya dan termasuk kebijakan baik internasional maupun nasional yang telah dilakukan dan dihasilkan. Contoh dari kebijakan adalah *Convention on Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Sayangnya, lepas dari adanya kemajuan yang dicapai, data menunjukkan bahwa berbagai bentuk ketimpangan dan ketidakadilan masih banyak terjadi.

Ilustrasi: dalam durasi sejak 1 Januari 2023 hingga saat ini (*real time*) menunjukkan bahwa masih ada sejumlah 18.729 kasus kekerasan yang mana 3.833 korban laki-laki dan 16.563 korban perempuan.

GEDSI dan Penyandang Disabilitas:

1. **Definisi perspektif medis:** Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. **Definisi perspektif konstruksi sosial:** disabilitas adalah (juga) sebuah konstruksi sosial. Jadi, dalam teori ini, disabilitas atau ketidakmampuan para kelompok tertentu tersebut adalah juga diakibatkan kegagalan struktur dan sistem untuk mendorong inklusi mereka. Di sini, struktur, sistem dan masyarakat-lah yang mendisablekan mereka atau membuat mereka tidak mampu; contoh di sini adalah bangunan kampus atau kantor atau kantor publik yang membuat mereka tidak mampu mengakses manfaatnya, maupun masyarakat yang masih memiliki stigma negatif.
3. **Upaya dan kebijakan:** Ada beberapa upaya dan kebijakan di antaranya adalah bahwa kebijakan negara yang mengamanatkan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Prinsip-prinsip atau asas pemenuhan hak penyandang disabilitas dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Penghormatan terhadap martabat;
 - b. otonomi individu;
 - c. tanpa diskriminasi;
 - d. partisipasi penuh;
 - e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
 - f. Kesamaan Kesempatan;
 - g. kesetaraan;
 - h. aksesibilitas;
 - i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
 - j. inklusif; dan
 - k. perlakuan khusus dan Perlindungan lebih.

GEDSI dan Kelompok Minoritas

1. Minoritas adalah mereka, dengan kesamaan identitas baik ras, suku atau adat, agama dan lainnya, yang secara jumlah sangat sedikit dibandingkan masyarakat pada umumnya.
2. Ruang lingkup kelompok minoritas yang ditawarkan untuk konteks Indonesia adalah: (1). Kelompok Minoritas Ras (2). Kelompok Minoritas Etnis (3). Kelompok Minoritas Agama dan Keyakinan (4). Kelompok Penyandang Disabilitas (5).
3. Kelompok Minoritas berdasarkan Identitas gender dan Orientasi Seksual
4. **UPAYA DAN KEBIJAKAN.** Meski hak-hak kelompok ini telah diakui sejak masa Perang Dunia I, jaminannya baru dinyatakan dalam Deklarasi UNESCO menentang Diskriminasi dalam pendidikan pada tahun 1960. Dalam Instrumen HAM Internasional yang lebih mengikat, hak-hak kelompok minoritas dijamin oleh Pasal

27 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR, 1966), yang kemudian juga dicantumkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA, 1989). Dalam perkembangannya Deklarasi mengenai Hak-hak Minoritas baru dikeluarkan pada tahun 1992. Akhirnya, deklarasi ini menawarkan definisi atau pengertian dari minoritas itu sendiri dalam Pasal 1 yang memberi pengertian minoritas berdasarkan identitas kebangsaan atau etnis, budaya, agama dan bahasa, dan membebaskan kewajiban kepada Negara untuk melindungi keberadaan mereka.

5. **PERSOALAN.** Kelompok minoritas sering mengalami berbagai diskriminasi dan ketidakadilan diantaranya dalam bentuk stigma negatif. Diantara stigma itu misalnya bahwa kelompok adat adalah sebagai komunitas terbelakang dan tidak berperadaban, sehingga menghambat kemajuan. Sementara itu, penganut agama lokal sering dituding sebagai komunitas yang tidak beragama dan kafir. Selain itu ada juga eksklusi sosial baik secara langsung maupun tidak langsung.

HAM & Perlindungan Minoritas

Sebagaimana diamanatkan panduan Implementasi PBB Resolusi No. 47/135 tentang Deklarasi Hak- Orang-orang yang termasuk Kelompok Minoritas Bangsa atau Suku Bangsa Agama dan Bahasa (*Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*), ada empat aspek yang menjadi cakupan hak yang perlu dilindungi bagi kelompok minoritas yaitu sebagai berikut:

- b. Kemampuan bertahan dan eksistensi (*Survival and Existence*). Aspek ini merupakan bentuk penikmatan terkait eksistensi (pengakuan atas keberadaan) sebagai "kelompok penyandang hak" dalam suatu negara. Pengakuan atas eksistensi merupakan pengakuan secara sosiologis (keberadaan fisik) dari kelompok minoritas. Sedangkan pengakuan identitas merupakan pengakuan sebagai entitas legal dalam suatu negara.
- c. Pemajuan dan Perlindungan Identitas kelompok minoritas (*Promotion and Protection of the Identity of Minorities*). Aspek ini merupakan bentuk penikmatan yang diperlukan untuk memajukan identitas kelompok dan mencegah upaya-upaya yang dapat mengakibatkan lenyapnya dan hancurnya identitas dan kebudayaan mereka.
- d. Kesetaraan dan Nondiskriminasi (*Equality and Non-Discrimination*). Di depan hukum, kedua prinsip ini sangat mendasar, dan bahkan tidak diperlukan pembuktian terhadap intensi atau niat diskriminasi tersebut.
- e. Partisipasi yang Efektif dan Bermakna (*Effective and Meaningful Participation*). Partisipasi kelompok minoritas dalam berbagai aspek di ruang publik dan privat sangat penting untuk mempertahankan identitas mereka. Partisipasi ini tidak hanya bersifat formalitas, tapi harus efektif dan bermakna.

SESI 4: GEDSI dalam Perspektif Islam

Gambaran Umum

Gerakan kesetaraan gender adalah sebuah gerakan yang berupaya mewujudkan keadilan bagi perempuan yang banyak mengalami diskriminasi, stereotip, marginalisasi, beban ganda dan berbagai bentuk ketidakadilan lainnya. Gerakan ini didukung oleh Persatuan bangsa-Bangsa (PBB) dengan dikeluarkannya CEDAW (*Convention on*

the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women- Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan). Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 dan disahkan pada tanggal 24 Juli 1984. Hal ini sebagai respon dari pemberlakuan CEDAW oleh PBB bagi semua negara anggota pada tanggal 3 September 1981, dimana Indonesia adalah salah satu anggotanya.

Di Indonesia, gerakan ini semakin massif setelah didukung oleh berbagai kebijakan, di antaranya Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia. Kebijakan-kebijakan adil gender ini disambut antusias oleh para pendukung kesetaraan perempuan. Di sisi lain, banyak kelompok yang menolak gerakan kesetaraan gender karena dianggap sebagai agenda Barat.

Untuk menjawab berbagai penolakan tersebut, banyak akademisi, aktivis, ulama, termasuk ulama perempuan melakukan inovasi. Misalnya, konsep mubadalah (kesalingan) yang diperkenalkan DR. KH. Faqihuddin Abdul Qodir, Keadilan Hakiki oleh DR. Nur Rofiah, dan Konsep Masalahah oleh Nyai Hj. Badriyah Fayumi. Menggali nilai agama sebagai akar konsep Kesetaraan Gender telah membuka ruang diskusi berbagai kelompok dari latar belakang, membuka ruang dialog dan saling belajar.

Sesi ini akan menyajikan GEDSI dalam Perspektif Islam, dengan mengupas konsep *Islam Wasathiyah* dan *maqashid Assyariah* untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif.

Tujuan

1. Peserta memahami bahwa Kesetaraan Gender adalah bagian dari perjuangan Islam
2. Peserta memahami konsep Islam Wasathiyah sebagai konsep implementasi GEDSI untuk mewujudkan inklusi sosial.
3. Peserta memahami konsep Maqashidus syariah sebagai basis gerakan sosial, termasuk bagaimana memperlakukan kelompok disabilitas.

Pokok Bahasan

1. Konsep GEDSI dalam perspektif Islam.
2. *Islam Wasathiyah* dan *maqashid Asshariah* sebagai jalan menuju masyarakat inklusif

Metode

- Brainstorming
- Presentasi
- Tanya Jawab

Waktu

180 menit

Alat dan Media

1. Kertas Plano
2. Spidol
3. Laptop

4. Proyektor
5. Materi Presentasi

Langkah-Langkah Fasilitasi

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan memberikan pengantar terkait biodata singkat narasumber.
2. Sebelum ke narasumber, fasilitator meminta peserta untuk mengidentifikasi nilai/ value/prinsip yang ada di organisasi masing-masing yang mendukung upaya GEDSI atau pemahaman peserta terkait dengan GEDSI dalam perspektif Islam. Fasilitator mencatat setiap jawaban peserta. (Contoh nilai *tasamuh, tawazzun, i'tidal, insan kamil, dll*). Minta mereka eksplorasi terkait konsep-konsep tersebut dan fasilitator mencatat kata kunci dari penjelasan peserta.
3. Dari eksplorasi pemahaman peserta, fasilitator menyambungkan dengan tema yang akan disampaikan oleh narasumber, terutama tentang *Islam Washatiyah* dan *Maqhasid al Syariah*. Selanjutnya mempersilahkan narasumber untuk memberikan paparannya selama 60 menit
4. Fasilitator mencatat kata-kata kunci dari kedua konsep yang dipaparkan narasumber
5. Setelah selesai presentasi narasumber, fasilitator membuka sesi tanya jawab untuk peserta memperdalam pemahamannya terkait kedua konsep tersebut.

Catatan Fasilitator:

Fasilitator perlu mengeksplorasi lebih lanjut terkait GEDSI dalam Islam terutama tentang *Islam Wasathiyah* dan *Maqashidus Syariah* agar penjelasannya mengarah untuk pencapaian tujuan sesi.

LAMPIRAN MATERI

ISLAM WASATHIYAH DAN GEDSI

Ciri khas Islam yang paling menonjol adalah *tawāsuṭ, ta'ādul, dan tawāzun*. Ini adalah beberapa ungkapan yang memiliki arti yang sangat berdekatan atau bahkan sama. Oleh karena itu, tiga ungkapan tersebut bisa disatukan menjadi *wasatiyyah*. Watak *wasatiyyah* Islam ini dinyatakan sendiri oleh Allah SWT di dalam QS. Al-Baqarah;143. Dalam hadits dikatakan: "Sebaik-baik persoalan adalah sikap-sikap moderat." "Dan sebaik-baik amal perbuatan adalah yang pertengahan, dan agama Allah itu berada di antara yang beku dan yang mendidih."

Dalam *jam'iyah* Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari golongan *Ahlussunnah wal Jama'ah* (aswaja), watak *wasatiyyah* tersebut antara lain terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

Islam adalah agama *rahmatan li al-'ālamīn* yang bersifat universal. Artinya, misi dan ajaran Islam tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok atau negara, melainkan seluruh umat manusia, bahkan jagat raya.

- a. Beberapa karakter aswaja yang juga sebenarnya merefleksikan nilai-nilai universal dari Islam moderat yang ada di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia adalah

- **al-tawāsuḥ** atau sikap moderasi, di tengah-tengah, sedang-sedang, tidak berlebihan, tidak ekstrim ke kanan maupun ke kiri.
 - **al-tawāzun** atau seimbang dalam segala hal, termasuk penggunaan logika dan analisis atau dalil aqli dan juga tradisi teks atau dalil naqli.
 - **al-i'tidāl** atau tegak lurus
- b. Dalam Islam **wasatī**, ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Dalam aspek kebudayaan misalnya, ada prinsip melestarikan tradisi sambil terbuka atau mengadopsi yang baru dan baik "**al-muḥāfazatu 'ala al-qadīm al-ṣālih wa alakhzu bi al-jadīd al-aṣlah**". Sementara itu, pendekatan dalam aspek dakwah adalah misalnya berdakwah itu mengajak bukan menghukum, mempersuasi bukan menakut-nakuti, sehingga kemudian masyarakat menjadi tertarik, dan dalam hal ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh para Wali Songo, penyebar Islam pertama di Indonesia.
- c. Dalam mendorong kohesi sosial dan termasuk adanya empati antar golongan masyarakat tanpa membedakan ras, suku, bahkan agama, ada trilogi ukhuwah atau persaudaraan yang dikenalkan oleh muslim Indonesia, dan salah satu yang mempeloporinya adalah misalnya Nahdlatul Ulama yaitu **Ukhuwah Basyariyyah, Waṭaniyyah, dan Islāmiyyah**. **Ukhuwah Islāmiyyah** adalah persaudaraan karena agama, sementara **Ukhuwah Waṭaniyyah** adalah persaudaraan karena sesama sebagai masyarakat Indonesia sehingga tidak menutup atau mengeksklusikan orang-orang yang berbeda agama padahal sebenarnya satu saudara dan kebangsaan. Yang menariknya lagi, **Ukhuwah Basyariyyah** adalah membuka ruang bagi kita untuk menganggap saudara mereka yang berbeda bahkan berbeda agama dan bangsa karena sebenarnya adalah persaudaraan umat manusia. Ini dikenalkan oleh tokoh NU KH. Ahmad Shiddiq.
- d. Dengan pemikiran trilogi tersebut, Kiai Ahmad Siddiq sebenarnya ingin menyatukan antara **Ukhuwwah Islāmiyyah**, Nasionalisme, dan Pluralisme. Pemikiran atau ide brilian ini dikemukakan pada tahun 1989 di Yogyakarta. Sebagai konsekuensi, di antara beberapa sikap aplikatif yang sebaiknya dimiliki oleh individu atau manusia dalam bermasyarakat ketika kita mendorong GEDSI adalah sifat akomodatif atau bersedia menampung berbagai kepentingan dan aspirasi dari berbagai pihak tanpa ada diskriminasi negatif, meskipun tetap harus ada sikap selektif, sikap integratif, dan sikap kooperatif.
- e. Di antara beberapa dalil terkait dengan **Ukhuwwah Islāmiyyah, Waṭaniyyah, dan Basyariyyah** adalah QS. al-Hujurat ayat 10 yang intinya adalah bahwa sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, dan sementara bahwa ada hadis Nabi juga yang menjelaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang tergantung pada cintanya seseorang atas kebaikan saudara muslim atau mukminnya sebagaimana ia mencintai kebaikan bagi dirinya, dan juga hadis lainnya. Sementara terkait **Ukhuwwah Waṭaniyyah** itu adalah QS. Al-Ankabut ayat 36 yang nanti dilihat di hal 73, hal 72 dari buku modul fatayat dan QS. Asy-Syu'ara ayat 161 dan 162 juga QS. Asy-Syu'ara ayat 141 142. Sementara ukhuwah basyariyah itu berlandaskan dalil QS. Al-Hujurat ayat 11 dan 13. Dan juga serta beberapa hadis nabi misalnya bahwa "**man la yarḥam an-nāsa, la yarḥamhullāh 'azza wa jallā**" orang yang tidak menyayangi orang lain, maka Allah tidak akan menyayanginya (HR. Muslim) atau hadis lain diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad adalah "berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihi kalian".

GEDSI DALAM PERPEKTIF ISLAM

- a. Prinsipnya, Islam sebagai agama Tauhid menegaskan dan menjamin kesetaraan semua makhluk apapun ras, etnisitas dan jenis kelaminnya.
- b. Sebagai agama yang secara terma berarti juga kedamaian (*salama*) (selain dari makna penyerahan diri (*aslama*)), Islam jelas mendorong pada keadilan dan kedamaian.
- c. Karena memang diutus sebagai rahmat bagi semesta, Nabi membawa misi profetik dan salah satunya adalah *liberation of the oppressed* (pembebasan mereka yang tertindas). Hal ini tentu termasuk menjamin dan mendorong pemenuhan hak perempuan. Sebagai contoh, semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, hak memperoleh ilmu, kegiatan majlis ta'lim dan keaktifan meriwayatkan hadits bagi perempuan tidak pernah dilarang, bahkan didorong.
- d. Ada banyak contoh tokoh perempuan dalam sejarah Islam yang menunjukkan dukungan Islam terhadap kedudukan perempuan dan keadilan relasi juga partisipasi di ranah publik. Siti Khadijah pada sektor publik dan ekonomi (ia merupakan saudagar besar dan justru hartanya digunakan untuk perjuangan Islam), Siti Aisyah pada sektor keilmuan (ia merupakan salah satu perawi hadis terbesar), dan beberapa tokoh lainnya yang bahkan ikut serta secara aktif dalam peperangan.
- e. Selain fakta kesejarahan, ada banyak juga dalil yang menunjukkan dukungan Islam terhadap perempuan dan semangat keadilan kesetaraan gender. Berikut sedikit dari ayat dan dalil naqli tersebut, QS. Ali Imran ayat 195: Artinya:
- f. *"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyikan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari terhadap perempuan. Kurang sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik."* Dalil dari ayat lain adalah QS. At- Taubah: 71: *"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."*
- h. Keadilan dan kesetaraan gender bukan saja tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sebenarnya merupakan bagian dari semangat keadilan kesetaraan yang dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, GEDSI sangat relevan dengan keberagaman seseorang. Dalam hal ini, diskursus qiraah mubadalah dan juga perspektif masalahat dan keadilan hakiki sangat strategis sebagai bagian dakwah perjuangan GEDSI.

ISU ORANG DENGAN DISABILITAS DAN ISLAM

- a. Prinsipnya, Islam mengajarkan untuk menghormati dan memperlakukan semua orang dengan adil dan sama, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Bahkan, karena mereka memiliki keterbatasan (meski tetap memiliki potensi luar biasa), Islam justru mendorong perbuatan baik pada mereka yang

kebetulan kurang beruntung.

- b** Dalam Islam, penyandang disabilitas dianggap sebagai bagian dari masyarakat dan memiliki hak sama dengan orang lain. Beberapa cara Islam menyikapi kelompok rentan penyandang disabilitas antara lain menghargai hak-hak mereka; Islam mengajarkan untuk menghargai hak-hak penyandang disabilitas dan memperlakukan mereka dengan adil dan sama seperti orang lain; Islam membantu kelompok disabilitas yang tercermin dalam ajaran Islam untuk membantu penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari seperti membantu mereka dalam beraktivitas atau memberikan dukungan moral; Islam menghindari diskriminasi seperti tercermin dalam ajaran Islam yang melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan mengajarkan untuk memperlakukan mereka dengan hormat dan tidak membedakan mereka dari orang lain.
- c** Fakta kesejarahan. Sebenarnya, dengan penggalian data sejarah yang cukup tampak jelas bahwa Islam apresiatif terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan bahwa nabi merupakan contoh pembela hak-hak kaum penyandang disabilitas.
- Lebih dari 1400 tahun lalu, beliau dan para sahabatnya sudah menunjukkan dukungan dengan cara salah satunya bahwa kaum penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang baik dan kesempatan yang sama dengan sahabat lain yang non penyandang disabilitas untuk berjuang bersama Rasulullah dengan berbagai perannya.
 - Salah satu contoh riil adalah bahwa Rasulullah telah menjadikan seorang penyandang disabilitas tuna netra Abdullah ibnu Ummi Maktum sebagai muadzin bersama Bilal Bin Robah.²
 - Ada banyak para penyandang disabilitas lain yang juga mendapatkan kesempatan berjuang dan ini tentu memberikan rekognisi kepada mereka dan rekognisi ini merupakan bagian dari hak asasi manusia, karena pada akhirnya, manusia memiliki kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan aktualisasi diri. Harus diakui, rekognisi hak aktualisasi diri jelas makin signifikan dalam kaitannya dengan agama; manusia atau umat beragama juga memiliki kebutuhan untuk dapat berkontribusi kepada agamanya.
 - Di antara beberapa Sahabat yang bisa dikategorikan kelompok penyandang disabilitas dan telah berkontribusi luar biasa adalah Abdurrahman bin 'Auf. Beliau adalah termasuk dari 8 orang yang pertama kali masuk Islam, 10 orang yang dijamin masuk surga, dan 60 orang ahli syura pada hari pemilihan khalifah setelah Umar Faruq. Karena perang, dirwayatkan beliau mengalami banyak luka dan oleh karena itulah kemudian ia menjadi pincang pada betis dan kesulitan berjalan. Akan tetapi, ia tetap diberi peran luar biasa dan direkognisi dakwahnya, yang waktu itu kemudian dilanjutkan dalam bentuk lain, yaitu kedermawanan, sedekah harta untuk *jihād fi sabīlillah*.³
 - Sejarah juga menunjukkan bahwa kaum penyandang disabilitas pada masa

2 Hal ini diceritakan di dalam al-Mahalli (2677, 2007, Terjemahan).

3 Salah satu kemuliaan yang pernah dicatat oleh sejarah yang diberikan oleh nabi kepada Abdurrahman bin 'Auf yang tidak pernah diterima oleh siapapun atau diperoleh oleh siapapun bahwa pada masa perang Tabuk ketika Rasulullah terlambat datang untuk sholat, sementara Abdurrahman bin 'Auf telah menjadi imam sholat jamaah, Rasulullah ternyata sholat di belakangnya sebagai makmum.

itu juga tidak rendah diri untuk dapat ikut terlibat dalam berbagai kegiatan. Sayangnya, fenomena atau kenyataan ini jarang diekspos, dan telah terbukti dalam sejarah, hampir tenggelam dalam penelantaran fakta sejarah ini, atau karena minimnya kajian.

- e. Secara dalil *naqli*, ada banyak arahan yang tegas mewajibkan perlakuan baik pada semua terlebih para penyandang disabilitas.
 - Al-Qur'an yang menjadi rujukan umat muslim telah memberikan perhatian penuh terhadap kaum difabel, Al-Qur'an sendiri mengembangkan sikap positif terhadap kaum difabel.

"Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka." (Q.S. Ali Imran [3]: 191)

Akomodasi khusus (*rukhsah*) terhadap penyandang disabilitas juga tergambar dari ayat berikut:

"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit...(Q.S. an-Nūr [24]: 61)

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan bebas dari diskriminasi dalam kehidupan sosial.

- Dalam tafsirnya, *Tafsir Ayāt al-Akām*, Ali As-Shabuni menegaskan pesan tersebut dan menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang yang sombong. Dalam hal ini kita tahu bahwa definisi kesombongan, sebagaimana merujuk pada hadis, adalah merasa diri lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain dan atau menolak kebenaran. Jadi, jelas bahwa Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlakul karimah.⁴
- Hikmah luar biasa dari Surah 'Abasa khususnya ayat satu sampai empat adalah bagaimana Allah menunjukkan kedudukan para penyandang disabilitas sebagai hamba yang setara dengan lainnya dan memiliki potensi kebaikan, dalam hal ini menyucikan diri dan beriman, yang sama dengan lainnya.⁵

4 Al-Maraghi menyebutkan sebab turunnya ayat ini bahwasanya kaum muslimin merasa kesulitan untuk makan bersama orang buta, karena dia tidak dapat melihat tempat makanan yang baik, bersama orang yang pincang karena dia tidak dapat berebut makanan, dan bersama orang sakit, karena dia tidak menikmati makanan.

5 Salah satu kisah yang kadangkala disalahpahami akan tetapi tetap harus kita digarisbawahi pesannya adalah *asbāb al-nuzūl* dari Al-Qur'an Surat 'Abasa, yang mana menegaskan bahwa bahkan seorang nabi pun diberi tuhan teguran ketika tampak mengabaikan seorang yang tuna netra. Akan tetapi, tafsir lainnya adalah bahwa sebenarnya nabi hanya mencoba melihat dari perspektif kekuatan politik, dimana saat itu beliau sedang berdakwah kepada para pembesar kaum Quraisy yang diharapkan dengan masuknya mereka kepada Islam, maka dakwah Islam tidak perlu menderita lagi. Akan tetapi, tetap saja turunnya ayat tersebut dan redaksi serta pesan yang tegas adalah jelas merupakan suatu petunjuk terang luar biasa dalam Islam; hal ini kemudian dilanjutkan dengan cerita bahwa sejak saat itu Rasulullah senantiasa memuliakan Abdullah Ibnu Ummi Maktum ketika datang dan bahwa beliau SAW memenuhi seluruh kebutuhannya. Sebagaimana digambarkan

- Hadis: Hadis dari Anas, bahwa Nabi SAW meminta Ibn Ummi Maktūm menggantikannya untuk menjadi imam dan ia dalam keadaan buta.

f. Sikap Organisasi Keagamaan untuk Isu Disabilitas

- Dalam hasil dari Munas di Lombok, NU memformulasikan konsep disabilitas melalui 3 poin utama, yaitu landasan teologis untuk memahami isu tersebut, yang kedua hak hukum dan kapasitas hukum bagi orang-orang dengan disabilitas, dan yang ketiga kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak kaum penyandang disabilitas tersebut.
- Disusunnya fikih penguatan penyandang disabilitas oleh tim PBNU dan ini merupakan sebuah langkah tegas dalam mendukung pemenuhan hak hak kelompok penyandang disabilitas.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai contoh mengeluarkan fatwa Nomor 6/SM/MTT/3/2010 yang didalamnya menyebutkan program pemberdayaan bagi kelompok penyandang disabilitas di Yogyakarta.

QIRĀ'AH MUBĀDALAH, GEDSI DAN ISLAM

Konsep Qiraah Mubadalah dikenalkan oleh DR. KH. Faqihuddin Abdul Qodir yakni sebuah tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam merupakan salah satu tawaran terbaru dalam perjuangan gender dalam kaitannya dengan perspektif keagamaan khususnya Islam. Pada prinsipnya, konsep mubadalah menjadi konsep dalam kesetaraan gender yang menekankan pada relasi kemitraan atau kesalingan antara dua belah pihak yang bermitra dengan tujuan keduanya dapat mengambil manfaat dari kegiatan relasi tersebut. Hal ini tertuang dalam Surat At-Taubah ayat 71.

Sejarah juga menunjukkan manfaat relasi kemitraan antara laki-laki dan perempuan yang telah meriwayatkan ribuan hadits dan menjadi sumber informasi bagi kaum muslimin kala itu. Ada juga Fatimah binti Al-'Aqra', Syaikhah Syuhada, Zainab binti AlSyar'i, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan lain sebagainya Rubayyi' binti Mu'awwidz Ra. Berkata "Sungguh kami para perempuan, ikut berperang bersama Nabi Muhammad Saw, memberi minum dan melayani kebutuhan pasukan. Kami juga membawa pulang mereka yang terluka dan yang terbunuh ke Madinah (□ahīh Al-Bukhāri).

Pada konsep kesalingan ini yang dibangun adalah membangun kesadaran relasi kesalingan laki-perempuan dengan tidak hanya memahami teks-teks keagamaan secara parsial akan tetapi juga sebagai sebuah cara pandang yang mampu melahirkan keadilan relasi gender. Ide besarnya juga adalah tidak ada dikotomi domestik dan publik terhadap gender tertentu dan lebih mengedepankan kesepakatan berbagi peran di antara keduanya.

Tafsir Mubadalah menjadi relevan dan strategis karena tidak menempatkan perjuangan atau tujuan seolah hanya fokus pada perempuan saja, tetapi lebih kepada kesalingan dan kepada keduanya secara berimbang. Hal ini tentu cukup efektif menghindarkan sebagian kelompok laki-laki yang mungkin merasa anti karena salah paham terhadap pergerakan yang selama ini sudah dilakukan atau perjuangan

oleh ayat, *wa mā yudrīka la'allāhu yazakkā*, pesan lain yang disampaikan sebenarnya sangat *empowering* atau memberdayakan dan mendorong inklusi penyandang disabilitas. "Dan la tidak tahu bahwa justru yang a 'mā' tersebut bisa jadi justru yang menyucikan diri" secara indah menegaskan bahwa mereka para penyandang disabilitas juga memiliki potensi sama dan karenanya hendaknya diafirmasi dengan inklusi, bukan justru 'diabaikan' atau 'dieksklusi'.

yang selama ini telah dijalankan sebagai sebuah upaya untuk menggeser laki-laki dari dominasi. Alih-alih, dengan tafsir mubadalah, para kelompok laki-laki itu menyadari bahwa sebenarnya, dengan adanya kesalingan, potensi yang diberikan tuhan kepada separuh penduduk dunia ini juga bisa diberdayakan demi kebaikan bersama.

Menariknya, dalam perkembangannya, *qiraah mubadalah* akhir-akhir ini juga dijadikan kerangka berfikir untuk mendorong kesalingan dalam berbagai jenis relasi, tidak hanya relasi gender, namun juga relasi antar umat beragama.

MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH dan Upaya Mendorong Inklusi Sosial

Salah satu prinsip dalam syariat adalah bahwa tujuan dari syariat adalah kebaikan atau kemaslahatan manusia. Kemaslahatan sendiri dikonsepsikan oleh pemikir Islam seperti Imam Al Syatibi dan Imam Al-Ghazali. Pada intinya, masalah yang secara harfiah ini berarti baik, manfaat dan penting dapat dimaknai lebih komprehensif sebagai terpeliharanya kepentingan dan kebaikan dan terpenuhinya kebutuhan primer manusia yang meliputi agama, jiwa, harta, keturunan serta akan dan atau kehormatan. Jadi membawa manfaat, kebaikan serta menolak kemudharatan ini kemudian dirangkai dengan *kulliyat al-khams*.

Salah satu pemikir *maqashid syariah* yang cukup terkemuka pada era kekinian adalah Jasser Auda. Salah satu motivasinya untuk mendorong *mainstreaming* atau pengarusutamaan *maqashid al syariah* dalam berbagai pemikiran keagamaan adalah karena fakta bahwa kemiskinan dan berbagai persoalan sosial seperti konflik dan berbagai ketimpangan di dunia justru banyak terjadi di tengah masyarakat muslim.

Maqāshid al-syarī'ah sendiri mencoba menawarkan kerangka berpikir di mana fiqih atau syariah itu diletakkan sebagai karunia tuhan atas kemanusiaan yang akan memfasilitasi manusia untuk mencapai kesempurnaan atau keparipurnaan dalam hidup. Pada intinya, Jasser Auda berusaha menunjukkan bahwa tujuan dari Islam adalah kemaslahatan kemanusiaan sebagaimana ditegaskan dalam qur'an juga bahwa nabi adalah *rahmatan lil 'alamin*.

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya mencapai kemaslahatan bagi kehidupan manusia kemudian dirumuskan dalam kerangka yang disebut sebagai *alkulliyat al-khams*. Lima aspek tersebut yaitu *hifdz an-nafs* (penjagaan jiwa), *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan atau silsilah), *hifz al-'aql* (penjagaan akal), *hifz al-māl* (penjagaan harta), dan *hifz al-dīn* (penjagaan agama). Di era kontemporer ini ada sebagian yang mencoba mempropose atau mengajukan penjagaan lingkungan atau *hifz al-bī'ah*.

Selain itu, dinamika menarik dalam diskursus *maqashid* juga mengantarkan kita pada perluasan cakupan dari target 'kebermanfaatan' *maqāshid al-syarī'ah*. Kerangka yang tadinya spesifik kepada dan bagi umat muslim menjadi lebih universal kepada dan bagi umat manusia dan kemaslahatan kemanusiaan secara umum.

Sebagai contoh, honor atau *al-'ird* atau kehormatan yang telah menjadi konsep sentral di dalam tradisi Arab bahkan sejak zaman muslim dan kemudian ditegaskan nabi sebagai 'darah dan juga uang dan kehormatan bagi setiap muslim adalah *haram* (sakral) atau dilarang', telah kemudian diubah atau diperluas dari reservasi atau penjagaan kehormatan muslim menjadi penjagaan martabat kemanusiaan dan bahkan penjagaan atau perlindungan hak manusia secara umum.

SESI 5:

Mengenal konsep Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme Kekerasan dan terorisme sebagai Ancaman Inklusi Sosial

Gambaran Umum

Intoleransi, radikalisme, ekstremisme kekerasan dan terorisme tiga ancaman yang dihadapi Indonesia, termasuk banyak negara di benua lain. Gerakan ekstremisme kekerasan yang banyak mewarnai layar berita dan media sosial menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini. Untuk mencegah berkembangnya gerakan ini, dibutuhkan pengetahuan dan kesadaran bahwa gerakan ini dibangun untuk melemahkan pemerintah dan berpotensi besar dapat menghancurkan kesatuan Indonesia.

Mengenali gerakan ini sejak dini dari intoleransi dimana orang mulai menolak berbagai macam perbedaan, segregasi wilayah, dan pudarnya ruang kebersamaan diantarakelompokyangberbeda adalah keniscayaan yang harus dilakukan. Intoleransi yang dibiarkan akan menumbuh suburkan radikalisme dan dapat berkembang ke arah ekstremisme kekerasan, bahkan terorisme.

Sebagai ancaman serius, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait penanganan terorisme. Di antaranya UU No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pada 2021, terbit Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Sesi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peserta terkait konsep intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan sehingga bisa membedakan kejadian-kejadian yang ada di sekitar mereka, dan kemudian dapat mengambil tindakan dengan tepat agar gerakan tersebut tidak mendapatkan tempat di masyarakat.

Tujuan:

1. Peserta memahami istilah intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan, dan terorisme, serta perbedaan istilah-istilah tersebut.
2. Peserta memahami bagaimana mengidentifikasi gejala-gejala intoleransi, radikalisme, ekstremisme kekerasan, dan terorisme di lingkungannya.
3. Peserta memahami tahapan proses dari intoleransi menjadi terorisme.

Pokok Bahasan

1. Konsep dan karakteristik intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme kekerasan
2. Radikalisasi dan tahapan menuju ekstremisme kekerasan.

Metode

- Curah pendapat
- Presentasi
- Bermain

Waktu

120 menit

Alat dan Media

1. Kertas Plano
2. Spidol
3. Laptop
4. Proyektor
5. Materi Presentasi

Langkah-Langkah Fasilitasi

1. Fasilitator menjelaskan gambaran umum dan tujuan sesi ini.
2. Fasilitator menanyakan pengalaman peserta terkait dengan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme kekerasan, baik pengalaman personal, keluarga, maupun lingkungannya. Minta mereka untuk mengidentifikasi kejadian tersebut termasuk intoleransi, radikalisme atau ekstremisme kekerasan.
3. Fasilitator mencatat kata kunci dari setiap cerita peserta dan kemudian menjelaskan perbedaan intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan dengan menampilkan bahan presentasi terlampir dalam lampiran materi.
4. Setelah selesai menjelaskan tentang definisi, perbedaan dan ciri-cirinya, fasilitator mengajak peserta untuk bermain pernyataan. Fasilitator membuat 4 lokasi untuk intoleransi, radikalisme, ekstremisme kekerasan dan terorisme. Jika pernyataan tersebut dianggap intoleransi, maka peserta silahkan memilih lokasi intoleransi, demikian seterusnya.
5. Setelah peserta memahami instruksi permainan, fasilitator mulai membacakan pernyataan. Setelah peserta memilih lokasi istilah, minta mereka menjelaskan mengapa pernyataan tersebut kategori intoleransi/ radikalisme/ ekstremisme kekerasan/ terorisme. Klarifikasi ke peserta yang memiliki jawaban berbeda.

Pernyataan Fasilitator:

- a) Pemaksaan Berjilbab bagi Murid-Murid non muslim di sekolah
- b) Pemaksaan Berjilbab bagi Murid-Murid beragama Islam di sekolah negeri
- c) Berkembangnya hasutan kebencian terhadap kelompok syiah, berakhir pengusiran besar-besaran warga syiah.
- d) Rudi tidak mau bertetangga dengan orang yang berbeda agama dan etnis.
- e) Feni memutuskan memakai cadar karena ia meyakini bahwa perempuan sholihah itu harus menutupi semua auratnya. Kemudian dia mengajak teman-temannya untuk menggunakan cadar dengan memaksa karena ia merasa bertanggung jawab untuk berdakwah.
- f) Ekonomi sedang sulit, banyak masyarakat kehilangan kepercayaannya. Beni kemudian menyebarkan berita ke teman-temannya bahwa pemerintah telah berbuat tidak adil dan berniat untuk menghancurkan umat Islam secara perlahan. Ia kemudian mengajak teman-temannya untuk menolak Pancasila karena bukan ajaran Islam.
- g) Covid 19 memakan banyak korban. Pemerintah mewajibkan semua warga untuk vaksin. Ada sekelompok orang yang menganggap bahwa vaksin adalah cara pemerintah mengendalikan warganya, terutama kelompok-kelompok yang dianggap kritis. Vaksin mengandung chip sehingga kedepan pemerintah bisa memantau pergerakan orang yang sudah divaksin.

- h) Ahmad mengatakan pemerintah telah berbuat dzolim kepada orang Islam, *thaghut*, dan NKRI harus diganti dengan khilafah. Dia melakukan aksi pengrusakan fasilitas umum sehingga menimbulkan rasa takut sekitarnya
6. Setelah bermain pernyataan selesai, minta peserta merefleksikan tentang perasaannya setelah bermain.
7. Fasilitator kemudian menjelaskan tahapan radikalisis (lampiran).
8. Fasilitator menutup permainan dengan mengingatkan tanggung jawab sebagai warga negara untuk menjaga keutuhan NKRI

Catatan Fasilitator

Jika dalam brainstorming peserta tidak ada yang menceritakan pengalamannya bersinggungan dengan intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan, fasilitator sebaiknya memberikan contoh kasus maupun kejadian penyerangan tempat ibadah, kelompok minoritas agama, minoritas gender, maupun konflik karena perbedaan pilihan politik.



LAMPIRAN MATERI

Intoleransi adalah:

Sikap tidak menerima segala sesuatu yang berbeda dengan yang individu ketahui dan yakini sebagai sebuah kebenaran. Pada umumnya disertai dengan tindakan seperti pelecehan, penghinaan, perlakuan tidak adil/ diskriminatif sampai pelarangan praktik ibadah (PPIM- Rangkul). Sikap yang ditandai dengan: 1) tidak suka terhadap kelompok lain yang berbeda; 2) memusuhi kelompok lain yang berbeda, dan 3) secara sengaja mengganggu kelompok lain yang berbeda (Gusdurian -INFID).

Intoleransi juga didefinisikan sebagai sikap dan tindakan yang bertujuan untuk menghalangi, melawan, atau menyangkal hak-hak dasar warga negara yang dijamin Pancasila dan UUD 1945, terutama terhadap kelompok yang berbeda dan tidak disukai karena alasan dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status

sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, dan identitas lain yang dilindungi.⁶

Intoleransi dapat dikategorikan berupa intoleransi pasif dan intoleransi aktif. Intoleransi pasif adalah bentuk intoleransi yang masih dalam bentuk pikiran yang tidak toleran, seperti menyakini bahwa tafsir agama yang mereka pahami adalah yang paling benar sementara intoleransi aktif adalah pikiran toleran yang telah dimanifestasikan ke dalam bentuk ucapan dan tindakan. Intoleransi aktif ini menjadi jalan terbukanya proses radikalisme, jika sikap radikal terus berkembang akan menjadi ekstrem bahkan teroris.

Ciri-Ciri Intoleransi:

- a. Tidak menghargai dan menghormati hak orang lain;
- b. Diskriminasi atau membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, gender, dan lain-lain;
- c. Mengganggu kebebasan orang lain, baik dalam memilih agama, keyakinan politik dan memilih kelompok;
- d. Memaksakan kehendak pada orang lain;
- e. Tidak mau bergaul dan bersikap tidak baik dengan orang yang berbeda keyakinan;

Radikalisme adalah paham yang menghendaki perubahan secara menyeluruh dengan cara-cara yang tidak mengindahkan kebijaksanaan dan pemahaman terhadap pihak lain.⁷ Dari pengertian ini, semua perilaku yang dianggap memiliki muatan radikalisme dapat dikenali bahwa ia adalah entitas yang berwujud cara pandang, pemikiran, pemahaman, dan paham tertentu. Oleh karena ia merupakan paham, maka sifat kontak dan transformasinya melalui transmisi pemikiran berbentuk diskusi, sharing, propaganda, persuasi, dan sejenisnya. Indikasi lain dari gejala radikalisme adalah selalu memiliki target perubahan menyeluruh secara tegas. Tergantung pada konteks apa, perubahan bagi radikalisme adalah ukuran keberhasilan paham. Misalnya, jika ia hinggap pada konteks politik, maka harus terjadi perubahan besar-besaran pada tatanan politik, demikian juga ketika ia berkenaan dengan institusi agama.

Berikutnya, radikalisme selalu berhubungan dengan model gerakan yang tidak menghormati relasi sosial yang berlangsung saat itu. Dampak dari kehendak untuk melakukan perubahan menyeluruh biasanya mencederai cara-cara untuk mencapai perubahan itu sendiri. Gerakan radikalisme terkadang tidak selalu dikenali dari kekerasan fisik semata, namun hampir selalu dapat diamati ia dilakukan secara kekerasan yang lain, seperti kekerasan tutur, seperti persekusi dan sejenisnya. Kekerasan dan radikalisme menjadi identik karena memang target perubahan yang diinginkan oleh gerakan ini bersifat menyeluruh, mengakar, dan tanpa kompromi terhadap status objektif sebelumnya yang akan diubah.

Radikalisme yang sejatinya adalah cara pandang untuk menciptakan perubahan di dunia dengan cara-cara yang tanpa kompromi dapat dikenali melalui berbagai indikasi.

6 Buku Panduan Sekolah Demokrasi Online, L-KiS dan INFID, h.6

7 Ahmad Asrori, "Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas," *Kalam* 9, no. 2 (2015): 257

Ekstremisme kekerasan adalah tindakan kekerasan yang didorong atas atau dihubungkan dengan paham atau keyakinan ekstrem; sebuah keyakinan dan/ atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (UU No.5/ 2018).

Tidak semua ekstremisme-kekerasan selalu berujung pada terorisme. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok FPI misalnya, yang berisi kekerasan dan teror. Namun, aksi ini hanya berhenti pada kekerasan dan tidak mengarah pada upaya teror yang bisa menghilangkan nyawa orang.⁸

Ekstremisme kekerasan merujuk pada gerakan yang menganut paham yang membenarkan dan menilai hanya jalan kekerasan untuk mencapai tujuan. Mereka menggunakan kekerasan tersebut secara terbuka, sebagaimana dilakukan ISIS, atau secara diam-diam sebagaimana dilakukan kelompok teroris. Setelah tragedi 9/11 di mana terjadi aksi teror yang menewaskan ribuan orang, pemerintah Amerika Serikat mendeklarasikan perang melawan teror (*war on terrorism*). Menghadapi kekerasan dengan kekerasan lainnya. Amerika Serikat kemudian melakukan invasi ke sejumlah negara di Timur Tengah, seperti Irak.⁹

Dari penjelasan tersebut, berikut rangkuman ciri-ciri untuk mengenali masing-masing definisi: ¹⁰

Aspek	Intoleransi	Radikalisme	Ekstremisme Kekerasan	Terorisme
Karakter	Tidak menghargai perbedaan dan tidak menghormati hak orang lain	Memiliki karakter intoleransi	Memiliki karakter Radikalis	Memiliki karakter ekstremisme kekerasan
Sikap	Diskriminatif atau membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, gender, dan lain-lain;	Pro Kekerasan	Percaya cara kekerasan diperbolehkan	menggunakan kekerasan dan revolusioner
Ideologi	Tidak suka terhadap kelompok yang berbeda	Keyakinannya yang paling benar, yang lain tidak	Keyakinannya yang paling benar, yang berbeda dianggap kafir	Islam sebagai ideologi Politik untuk membangun sistem negara (Daulah Islamiyyah/Khilafah Islamiyah)

8 <https://lkis.or.id/2021/10/26/ekstremisme-kekerasan-violent-extremism/>

9 Wahid Foundation, Pelembagaan Konsep Ekstremisme Kekerasan dalam Kebijakan Pencegahan Terorisme di Indonesia, h.4

10 Rangkuman ciri-ciri ini diadaptasi sebagian dari Modul Training Membangun Ketahanan Masyarakat oleh Perempuan yang disusun oleh Tim AMAN Indonesia

Tujuan		Politis: kekuasaan harus direbut; menggunakan sistem	Politis: memiliki gagasan membentuk negara Islam mengganti NKRI	Mengganti NKRI dan anti Pancasila
Demokrasi	Menerima	Menolak Demokrasi	Menolak Demokrasi dan HAM	Menganggap pemerintah sebagai <i>thaghut</i>
Peran Dalam gerakan	Simpatisan Pendukung; pasif/ aktif	Kolaborator	Dalam aksi terorisme: aktor intelektual, educator, rekruter (sudah dibaiat), bahkan leader	Kader, Leader

Tahapan Radikalisasi¹¹

Dalam tulisan “*Radicalization in The West: The Homegrown Threat*” Mitchell Silber dan Arvin Bhatt, dua orang analis senior di Divisi Intelijen *New York Police Department* menawarkan pendekatan untuk memahami konsep radikalisasi, yaitu pendekatan model tahapan yang melihat radikalisme sebagai suatu proses internalisasi yang bertahap. Radikalisasi dilihat sebagai suatu proses dimana individu secara bertahap mengadopsi ideologi keagamaan dan politik yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Barat dan kemudian melegitimasi aksi terorisme sebagai alat pendorong perubahan sosial. Ideologi dan cara pandang ini kemudian dikembangkan menjadi berbagai jenis pengaruh nilai-nilai ekstremis. Proses internalisasi sistem dan cara pandang yang ekstrem ini kemudian yang disebut sebagai radikalisasi. Untuk melihat bagaimana proses radikalisasi terjadi, Silber dan Bhatt menawarkan empat tahapan proses radikalisasi, yaitu: (1) Pra-Radikalisasi, (2) Identifikasi Diri, (3) Indoktrinasi, (4) Jihadisasi.

Tangga radikalisasi



11 Hasil literature review Radikalisasi dan Deradikalisasi yang dilakukan oleh Adhe Nuansa Wibisono, Kajian Terorisme dan Keamanan Internasional UI yang bersumber dari buku Mitchell D. Silber and Arvin Bhatt, “*Radicalization in the West : The Homegrown Threat*”, (New York : New York Police Department Intelligence Division, 2007)

Pra-Radikalisasi, tahapan ini adalah titik awal seorang individu sebelum mereka memulai proses radikalisasi ini. Tahap ini adalah kondisi kehidupan mereka sebelum mengenal dan mengadopsi ideologi radikal sebagai ideologi personal yang mereka pilih. Mayoritas individu yang berada pada tahapan ini dimulai sebagai orang biasa biasa saja, memiliki pekerjaan dan kehidupan yang normal dan hanya sedikit yang memiliki catatan kriminal. Meskipun tidak terdapat profil psikologis yang umum untuk pelaku radikalisme, terdapat beberapa kesamaan akan faktor demografis, sosial dan psikologis yang membuat individu lebih rentan terhadap pesan radikal, sebagai contoh:

- a. *Lingkungan*, faktor-faktor demografis membentuk wajah suatu bangsa, negara, atau kota yang kemudian memainkan peran signifikan dalam penyediaan lahan subur untuk pengenalan dan perkembangan proses radikalisme. Kantong populasi etnis yang mayoritas adalah komunitas muslim umumnya menjadi cagar ideologis bagi pertumbuhan benih radikalisme. Selain itu, semakin besar kemurnian dan ketertutupan dari komunitas etnis ini, semakin membuat mereka menjadi rentan untuk dimasuki oleh pemikiran radikalisme, dengan dalih bahwa itu merepresentasikan nilai-nilai keagamaan yang lebih otentik, murni dan benar.
- b. *Kandidat*, individu yang tertarik dengan pemikiran radikal, biasanya hidup, bekerja, bermain dan beribadah bersama dengan kantong etnis komunitas muslim, yaitu komunitas yang didominasi oleh kebudayaan Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Selatan. Faktor jenis kelamin, usia, status sosial keluarga, tingkat kehidupan dan faktor psikologis semuanya mempengaruhi kerentanan dalam proses radikalisasi.

Identifikasi Diri, tahapan ini adalah fase di mana individu dipengaruhi baik oleh faktor internal dan eksternal, mulai untuk mempelajari doktrin keagamaan, secara bertahap meninggalkan identitas lama yang mereka miliki dan mulai untuk mengasosiasikan dirinya dengan individu yang sepaham dan mengadopsi ideologi ini sebagai ideologi yang mereka anut. Yang menjadi katalisator untuk tahapan ini adalah pencarian keagamaan sebagai awal penyadaran kognitif, atau krisis, yang mengguncang keyakinan seseorang dalam agama yang dipercayainya dan membuat seseorang menjadi terbuka untuk menerima cara pandang hidup yang baru. Terdapat banyak jenis penyebab yang dapat menjadi katalisator perubahan, yaitu: (a) Ekonomi (kehilangan pekerjaan, mobilitas sosial yang terhambat), (b) Sosial (alienasi, diskriminasi, rasisme – secara nyata maupun dirasakan), (c) Politik (konflik internasional yang melibatkan komunitas muslim), (d) Personal (kematian keluarga dekat).

Krisis personal seperti kematian anggota keluarga, menjadi salah satu titik balik bagi individu untuk mencari arah baru dalam kehidupan, kembali kepada nilai keagamaan sebagai cara untuk mengatasi permasalahan hidup, kekecewaan atau untuk menebus kesalahan masa lalu, selain itu alienasi dan keterasingan merupakan contoh dari konflik personal yang terjadi pada aktor terorisme yang tinggal di negara-negara Barat. Yang menjadi faktor utama yang berpengaruh selama tahapan konflik ini adalah pencarian keagamaan, jaringan relasi sosial yang terdiri dari pertemanan dan keluarga, pemimpin keagamaan, literatur dan internet.

Dua indikator penting dalam tahapan identifikasi diri adalah tahapan yang menunjukkan perkembangan dalam proses radikalisasi : (1) Perkembangan atau Pendekatan menuju doktrin keagamaan yang radikal, (2) Kehadiran yang rutin dan intens dalam tempat-tempat peribadatan dengan doktrin keagamaan yang radikal.

Jika individu ini mengadopsi doktrin keagamaan yang radikal, ciri-ciri umum yang muncul adalah : (a) Individu menjadi terasing dan menjauh dari kehidupan lama yang dimilikinya, kemudian berafiliasi dengan individu-individu lain yang memiliki pemahaman yang sama, (b) Membentuk atau bergabung dengan kelompok yang memiliki pemahaman serupa dalam rangka penguatan dedikasi dan komitmen individu kepada basis keagamaan yang lebih otentik, (c) Menghentikan aktivitas negatif seperti merokok, konsumsi minuman keras, berjudi dan pakaian ala gangster hip-hop, (d) Aktif terlibat dalam aktivitas sosial dan isu-isu komunitas.

Indoktrinasi, ini adalah sebuah fase di mana individu secara progresif menguatkan keyakinan keagamaannya, secara penuh mengadopsi ideologi jihadis dan menyimpulkan, tanpa pertanyaan, bahwa dalam kondisi dan situasi yang ada dibutuhkan tindakan nyata untuk mendukung dan memajukan ideologinya, aksi yang dimaksud adalah aksi jihad yang militan. Tahapan ini difasilitasi dan didorong oleh "*spiritual sanctioner*". Sementara itu proses identifikasi diri merupakan tindakan personal individu, hubungan dan asosiasi dengan individu-individu lain yang memiliki pemahaman serupa merupakan faktor penting dari pendalaman proses tersebut. Sedangkan pada tahapan indoktrinasi ini doktrin kelompok menjadi faktor yang sangat penting dimana cara pandang radikalisme disebarkan dan diperkuat di dalamnya.

Aspek utama dari tahapan ini adalah penerimaan akan cara pandang politik keagamaan yang membenarkan, mengesahkan, mendorong dan mendukung kekerasan terhadap apapun yang dianggap "kufur", tidak islami, termasuk peradaban Barat, orang-orangnya, sekutu-sekutunya, atau komunitas muslim lain yang pendapatnya dianggap berbeda dengan agenda radikalisme. Akibatnya jika individu mengalami indoktrinasi, mereka akan menata ulang arah kehidupannya. Artinya, daripada mencari dan berusaha untuk hal-hal yang umum seperti mendapatkan pekerjaan, menghasilkan uang, membangun sebuah keluarga, tujuan indoktrinasi radikal bersifat non-personal dan fokus untuk mendapatkan kebaikan yang lebih luas. Tujuan utama para individu menurut doktrin ini adalah untuk membentuk komunitas murni yang memegang nilai-nilai keagamaan secara otentik di seluruh dunia.

Jihadisasi, ini adalah tahapan di mana setiap anggota kelompok menerima kewajiban individual mereka untuk berpartisipasi dalam jihad dan mengangkat diri mereka sendiri sebagai tentara suci atau mujahidin. Pada akhirnya kelompok akan memulai perencanaan operasional dalam sebuah tindakan terorisme. Aksi ini secara lebih lanjut akan mencakup perencanaan, persiapan dan pelaksanaan serangan. Sementara dalam tahapan lain radikalisasi akan dilakukan secara bertahap dalam waktu dua atau tiga tahun, tahapan jihadisasi ini akan menjadi proses yang sangat cepat, hanya membutuhkan waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa minggu untuk menjalankannya.

Tahapan jihadisasi ini memiliki beberapa pra-tahapan, umumnya semuanya terjadi, walaupun tidak selalu secara berurutan. Setiap dari pra-tahapan ini ditandai dengan seperangkat indikator unik : (a) Menerima gagasan jihad atau memutuskan untuk melakukan jihad – karena setiap anggota menerima ide jihad, mereka biasanya mengarahkan tujuannya ke luar negeri – mencari suatu pemicu yang dapat mengarahkan mereka pada keputusan final untuk melakukan jihad atau mencari

peluang lain yang dapat mengantarkan mereka pada seruan jihad, (b) Pelatihan/ Persiapan – ketika setiap anggota kelompok memutuskan untuk melakukan jihad, mereka semakin terisolasi dari kehidupan sekuler atau kehidupan di luar kelompok. Mereka mencapai titik dimana hanya orang-orang yang mendapat kepercayaan penuh yang dapat menjadi anggota kelompok. Mereka menjadi sangat terikat antara satu dengan lainnya dan seringkali mencari peluang untuk melakukan kegiatan, pelatihan dan aktivitas secara bersama, (c) Perencanaan serangan – jika ada kelompok yang memutuskan untuk melakukan serangan, mereka mulai melakukan penelitian dan juga menyusun perencanaan taktis rahasia tentang target serangan, bentuk-bentuk serangan, skenario operasional (tanggal, waktu dan jam) dan peranan dari setiap anggota dalam serangan tersebut.

SESI 6: **Implementasi Konsep Islam *Rahmatan Lil `Alamin*** **untuk membangun Masyarakat Inklusif**

Gambaran Umum

Islam rahmatan li al-`alamīn merupakan salah satu ajaran universal yang menekankan Islam sebagai perdamaian, persaudaraan, toleransi, kesantunan, dan keseimbangan dalam kehidupan di dunia. Nilai ini sejalan dengan cita-cita kebangsaan Indonesia, salah satunya mendorong perdamaian. Ajaran dasar Islam ini selaras dengan realitas Indonesia dengan beragam suku, agama, ras dan antar golongan namun dapat dipersatukan dengan *Bhineka Tunggal Ika* (berbeda-beda tetap satu), yang bermakna bahwa persatuan dalam perbedaan, dan perbedaan untuk persatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep *rahmatan li al-`alamīn* sebagai perwujudan cita-cita Islam dalam kebangsaan dapat diaktualisasikan dengan 3 cara, yaitu: (1) memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan memahami perkembangan teknologi dan sains; (2) tidak emosi dalam beragama; dan (3) hati-hati dalam setiap ucapan, perbuatan serta tindakan.^[68] Sesi ini bertujuan untuk membekali peserta akan konsep dan pemahaman bagaimana mengaplikasikan Islam *rahmatan li al-`alamīn* dalam kehidupan nyata, terutama dalam upaya membangun masyarakat inklusif.

Tujuan

Peserta memahami konsep Islam *rahmatan li al-`alamīn* yang aplikatif untuk membangun masyarakat inklusif

Pokok Bahasan

Konsep *Rahmatan Lil `alamin* dan bagaimana mengimplementasikannya dalam membangun masyarakat inklusif

Metode

- Curah pendapat
- Presentasi Narasumber
- Tanya Jawab

Waktu

120 menit

Alat dan Media

1. Laptop
2. Proyektor
3. Materi Presentasi

Langkah-Langkah Fasilitasi

1. Fasilitator menjelaskan gambaran umum dan tujuan dari sesi ini dan membacakan biodata narasumber.
2. Sebelum mempersilahkan narasumber memberikan pemaparan, fasilitator bertanya apa yang dipahami oleh peserta tentang Islam Rahmatan Lil `Alamin. Fasilitator mencatat semua kata kunci dari jawaban peserta.
4. Fasilitator mempersilahkan narasumber menyampaikan presentasi dalam waktu 45 menit untuk mengelaborasi implementasi konsep Islam *rahmatan li al-`alamīn* untuk membangun Masyarakat Inklusif.
5. Fasilitator mencatat beberapa kata kunci dari presentasi narasumber. Setelah selesai, buka sesi tanya jawab.
6. Jika peserta terlihat tidak mau bertanya, fasilitator mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperdalam paparan narasumber terkait membumikan Islam Islam *rahmatan li al-`alamīn* menuju masyarakat inklusif.
7. Fasilitator menutup sesi dengan memberikan penekanan pada universalitas ajaran agama, yakni berfokus pada kemanusiaan, kebaikan, keadilan dan kesejahteraan umat.

Catatan Fasilitator

Jika tidak ada peserta yang bertanya kepada narasumber, maka fasilitator perlu menggali lebih dalam dari pemaparan narasumber terkait prinsip dan nilai apa yang harus dikembangkan dalam mengimplementasikan Islam Rahmatan Lil `Alamin dalam kehidupan di keluarga dan di masyarakat pada umumnya. Jika perlu minta narasumber untuk memberikan contoh-contoh konkret perilaku yang menunjukkan pengejawantahan nilai tersebut.

LAMPIRAN MATERI

Wujud Islam *Rahmatan Li Al-`ālamīn* dalam Kehidupan Berbangsa di Indonesia ¹²

Konsep Islam *Rahmatan li al-'Ālamīn*

Secara terminologi bahasa Islam *Islam rahmatan li al-'ālamīn* terdiri atas Islam dan *rahmatan li al-'ālamīn*. Islam berasal dari kata *salama* atau *salima*, artinya damai, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan. Fatwa tentang Terorisme dan Bom Bunuh Diri yang disampaikan Muhammad Tahir-ul-Qadri menyatakan: “seperti makna literalnya,

¹² Diringskas dari hasil penelitian Muhammad Nur Jamaluddin, dimuat di Jurnal Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 2, Desember 2020.

Islam adalah pernyataan absolut tentang perdamaian. Agama Islam adalah manifestasi damai itu sendiri. Islam mendorong manusia untuk menciptakan hidup proporsional, damai, penuh kebaikan, keseimbangan, toleransi, sabar, dan menahan marah."

Kata Islam yang terderivasi sehingga menjadikan Islam memiliki varian makna yang diafirmasi oleh Alquran sendiri, meliputi: selamat dan sejahtera (Qs. Maryam/19: 47), damai (Qs. Al-Anfāl/8: 61 dan Qs. Al-Hujurāt/49: 9), bersih dan suci (Qs. Asy-Syu'arā'/26: 89, Qs. Al-Māidah/5: 6 dan Qs. As-Shaffāt/37: 84), menyerah (Qs. An-Nisā'/4: 125 dan Qs. Āli Imrān/3: 83), penyerahan diri secara totalitas kepadaNya (Qs. Al-Baqarah/2: 208 dan Qs. As-Shaffāt/37: 26). Selanjutnya makna "rahmat" menurut Ibnu Mandzur adalah *al-riqqatu wa al-ta'attufi* (kelembutan yang berpadu dengan rasa keibaan). Selain itu bermakna kelembutan hati, kehalusan dan belas kasihan sebagaimana pendapat ini disampaikan Ibnu Faris, pun bahwa kata *rahima* bermakna hubungan kerabat, persaudaraan, dan ikatan darah. Hal tersebut dipertegas oleh Al-Asfahani bahwa rahmat merupakan *al-ihsān almujarrad dūna al-riqqat* (kebaikan tanpa belas kasih) dan *al-riqqat al-mujarradah* (belas kasih semata-mata).

Penjelasannya bahwa apabila rahmat disandarkan kepada manusia, maka hanya kebaikan berupa simpati semata dari manusia itu sendiri, sedangkan apabila disandarkan terhadap Allah Swt, maka bermakna kebaikan semata-mata datangnya hanya dari Allah Swt Yang Maha Kuasa. Adapun makna rahmat dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat dalam Qs. AlAnbiyā'/21: 107 yang artinya "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk(menjadi) rahmat bagi semesta alam. Artinya bahwa rahmat dalam Al-Qur'an hanya dari Allah Swt Sang Pemberi Rahmat bagi semua makhluk-Nya. Rahmat yang diberikan Allah Swt kepada makhluknya dapat berupa kemenangan, kebaikan, kenikmatan, kasih sayang, dan banyak lagi. Rahmat merupakan sifat rahman Allah Swt yang terkandung di dalam Al Qur'an, dapat diterima dan dirasakan oleh seluruh umat manusia bahkan seluruh alam. Pun Nabi Muhammad saw dilahirkan ke bumi dijadikan sebagai rahmat dari Allah SWT, sebagaimana sabdanya: "Yā ayyuha al-nās, innamā anā rahmatun muhdātun (wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadihkan Allah)".

Islam *rahmatan li al-'ālamīn* merupakan salah satu solusi untuk dunia karena visi Islam penuh dengan kedamaian, persaudaraan, dan toleransi yang penuh rahmat untuk seluruh alam. Selain itu Islam *rahmatan li al-'ālamīn* yang diajarkan melalui Nabi Muhammad SAW berdampak komprehensif, holistik, inklusif dan positif, tidak memiliki kelemahan dan atau kekurangan, selalu suci dan autentik berdasarkan IlahiahNya.

Adapun hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang mengilustrasikan makna Islam *rahmatan li al-'ālamīn* antara lain:

"Dari Abdullah bin 'Amru. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seorang muslim adalah orang yang kaum Muslimin selamat dari (kejahatan) lisan dan tangannya, dan seorang Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah." (HR. Al Bukhari No.10, dan Muslim No.40).

Dalam sebuah hadits disebutkan: "Ada seorang yang bertanya kepada Rasūlullāh 'Wahai Rasūlullāh Shallallāhu 'alaihi wa sallam, Islam yang bagaimanakah yang paling baik?' Beliau menjawab: Engkau memberi makan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak kenal." (HR. Al-Bukhāri No.12 dan Muslim No.39, dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhumā)

Selain itu, dalam hadits riwayat An-Nasa'i, Nabi Muhammad SAW adalah itu muslim Seorang "bersabda orang yang orang-orangnya manusia lainnya merasa aman

(kejahatan) lisan dan tangannya dan orang mukmin adalah orang yang manusia lainnya merasa aman atas darah (jiwa) dan harta mereka."

Berdasarkan 3 hadis di atas menjelaskan bahwa Islam merupakan perwujudan keselamatan dan kedamaian untuk seluruh alam, termasuk umat manusia didalamnya. Kata rahmat yang berarti sebagai kasih sayang dan *li al-'ālamīn* berarti sebagai seluruh alam dalam istilah Islam *rahmatan li al-'ālamīn* terdapat di dalam (Qs. Al-Anbiyā'/21: 107). Adapun salah satu tafsir terhadap ayat tersebut disampaikan Al-Tabāri dalam *Jamī' al-Bayaā Fi Ta'wīl alQur'ān*: apakah rahmat itu dengan diutusnya Nabi Muhammad saw ditujukan kepada seluruh alam, termasuk orang-orang kafir, atau hanya kepada orang-orang yang beriman saja? Ada dua pendapat yang disampaikan oleh Al-Tabāri, pertama: bahwa rahmat bagi orang yang beriman berasal dari Allah Swt yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dengan cara memasukkan keimanan kepada seseorang agar mampu mengerjakan amal kebaikan yang diperintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya. Kedua, bahwa makna rahmat bagi orang kafir itu diberikan oleh Allah Swt berupa penundaan bencana (*bala*), sebagaimana hal tersebut pernah Allah turunkan kepada umat-umat yang dahulu mendustakan para nabi dan rasul Allah.

Beberapa uraian di atas berusaha menunjukkan konsep Islam *rahmatan li al-'ālamīn* sebagaimana mestinya, namun masih terlihat begitu abstrak. Ada pengertian yang menjelaskan konsep Islam *rahmatan li al-'ālamīn* melalui operasionalisasi yaitu dari Nur Syam bahwa konsep dan upaya orang Islam di dunia umumnya, khususnya di Indonesia dalam mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam itu, berarti bukan hanya keselamatan dan kedamaian untuk semua manusia tetapi juga untuk alam lainnya, meliputi *habl min Allāh*, *habl min al-nās* dan juga *habl min al-ālam*. Artinya bahwa keselamatan manusia tidak ada artinya jika alam dan sekitarnya tidak dalam keselamatan. Islam yang menyelamatkan adalah Islam yang memberikan keselamatan bagi semuanya sehingga terwujud perdamaian dan kesejukan bagi seluruh alam.

Selain itu Nur Syam menyatakan pula bahwa konsep Islam *rahmatan li al-'ālamīn* berupaya untuk mengembangkan pola hubungan yang terjadi antara manusia baik yang humanis, dialogis, toleran bahkan pluralis, hal tersebut dilakukan dengan pengelolaan, pemanfaatan dan pendayagunaan alam dengan penuh rasa kasih dan sayang. Pluralis dalam arti memiliki relasi tanpa memandang suku, bangsa, agama, ras ataupun titik lainnya yang membedakan antara satu orang dengan orang lain. Humanis dalam arti menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghargai manusia sebagai manusia. Dialogis dalam arti semua persoalan yang muncul sebagai akibat interaksi sosial didiskusikan secara baik dan akomodatif terhadap beragam pemikiran. Toleran dalam arti memberi kesempatan kepada yang lain untuk melakukan sebagaimana yang diyakininya, dengan penuh rasa damai.

Konsep Nilai-nilai Keislaman dalam Kebangsaan

Islam yang diyakini sebagai agama kepercayaan oleh umat Islam, memiliki konsepsi keyakinan, norma-norma, dan tata aturan yang diyakini dilakukan oleh penganutnya secara konsisten dan konsekuen. Islam yang memiliki aturan lengkap dan komprehensif, berfungsi pula sebagai pengontrol dan pengawas, memberikan sanksi dan juga penghargaan menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya umat Islam mampu mengamalkan

ajaran Islam secara tawadhu guna mencapai kualitas hidup yang aman, nyaman, dan sejahtera baik di dunia maupun kelak di akhirat.

Nilai-nilai keislaman yang terdapat dalam kebangsaan dapat dijelaskan dalam dua paradigma, yaitu: Paradigma pluralisme sebagai upaya persatuan, nasionalisme dan Islam yang mempunyai hubungan positif. Islam sebagai contoh membentuk nasionalisme yang dapat melahirkan bangsa adalah negara Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw. Paradigma universalisme, maksudnya Islam bertentangan dengan kebangsaan: menurut Mansur. Mansur menyatakan bahwa agama Islam yang universal tidak pernah membatasi peruntukannya bagi siapa dan dimanapun saja. Namun, Islam hadir dalam setiap wilayah kebangsaan. "Cinta tanah air sebagian dari iman" pepatah mengatakan seperti itu, artinya bahwa bagian salah satu dari iman adalah cinta tanah air yang menjunjung tinggi nilai nasionalisme. Mansur menyatakan juga bahwa Islam tidak bertanah air, tetapi penganutnya (umat Islam) pasti memiliki tanah air, dengan demikian mencintai, membela dan menjaga tanah air merupakan kewajiban umat Islam.

Eksklusifitas yang terjadi dalam realitas kebangsaan harus diminimalisasi sehingga misi Islam *Rahmatan Lil'alam* dapat tercapai sebagaimana mestinya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meyakini bahwa esensi sesungguhnya terdapat dalam kalimat "*lā ilāha illallāh*" (Tiada Tuhan Selain Allah). Kemudian Nabi Muhammad saw mengaplikasikannya dengan membangun masyarakat Madinah melalui Piagam Madinah. Piagam Madinah telah memuat nilai-nilai dan pesan Rasulullah SAW dan ditegaskan pula melalui Haji Wada agar semua umat untuk saling menghormati, menghargai, memiliki rasa persaudaraan, perdamaian, menghindarkan pertumpahan darah, mengangkat kehormatan wanita, dan seterusnya.

Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung norma-norma kebaikan merupakan nilai kebangsaan Indonesia yang menjadi pedoman dan tujuan keluhuran bangsa yang abadi dan lestari. Hal tersebut berlaku di masa lampau, masa kini atau untuk masa depan kehidupan bangsa Indonesia. Nilai kepribadian bangsa dapat dibedakan menjadi dua yaitu secara dinamik akan menjadi semangat kebangsaan, sedangkan secara statik terwujud dalam ideologi, dasar negara yang menjadi jati diri bangsa. Semua itu didapatkan dan diakomodasi dari kemajemukan Indonesia. Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika merupakan nilai kebangsaan Indonesia yang mengacu pada empat pilar kebangsaan.

Nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila: nilai religius yang terkandung dalam sila pertama memiliki nilai-nilai spiritual berdasarkan keyakinan dan agama yang dipeluk oleh setiap orang yang memiliki toleransi beragama sebagai pengejawantahan dari pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kekeluargaan yang terkandung dalam sila kedua memiliki nilai senasib sepenanggungan dalam kebersamaan berkebangsaan dan bernegara tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan sebagai kontekstualisasi Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk. Nilai persatuan atau keselarasan yang terkandung dalam sila ketiga, nilai keselarasan memiliki kemampuan untuk menerima budaya dan kearifan lokal dan memahami keberagaman dari bangsa yang plural. Nilai kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat merupakan wujud kedaulatan rakyat yang mesti adanya keberpihakan terhadap rakyat. Nilai keadilan yang terkandung dalam sila kelima memiliki sifat keberpihakan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian nilai kebangsaan yang terdapat dalam UUD 1945 diantaranya yaitu pertama: nilai dalam Pembukaan UUD 1945 terdiri atas nilai kemanusiaan, religius, produktivitas, dan keseimbangan. Kedua: nilai dalam pasal-pasal dan ayat-ayat UUD 1945 adalah nilai demokrasi, kesamaan derajat, ketaatan hukum dan ketiga: nilai kebangsaan dalam bentuk NKRI. Selanjutnya nilai kebangsaan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika meliputi, nilai gotong royong, kerjasama, nilai keadilan, dan nilai toleransi. Apabila dicermati bahwa Pancasila terefleksi ke dalam nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, NKRI, dan Semboyan Bhineka Tunggal Ika. Hal tersebut terjadi karena Pancasila merupakan ideologi, dasar negara, dan jati diri bangsa Indonesia yang menjadi falsafah sumber nilai kebangsaan Indonesia.

Secara teoritis, tampaknya tidak ada kesulitan untuk menginternalisasi proses pembangunan nilai-nilai keislaman dalam kebangsaan. Pernyataan ini bukan didasarkan pada kondisi demografi dimana mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, tetapi lebih didasarkan pada fakta ideologis, bahwa Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yang telah lama dipahami, dihayati, bahkan telah diamalkan oleh segenap bangsa Indonesia, tidak ada satu sila pun dari Pancasila itu yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Diformalkan atau tidak, nilai-nilai keislaman telah menjiwai Pancasila sejak dahulu, karena Pancasila telah menjadi falsafah pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, sebelum Indonesia merdeka bahkan sebelum Pancasila disahkan oleh para founding fathers. Wujud konkret dari implementasi nilai-nilai Pancasila pada setiap individu warga bangsa ini, tidak lain adalah implementasi dari nilai-nilai keislaman. Selain itu, bagi bangsa Indonesia yang religius, sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai keagamaan akan lebih mudah diterima untuk dijadikan pedoman hidup. Hal tersebut disebabkan adanya faktor keimanan yang kuat terhadap nilai-nilai keagamaan yang diyakini dan dapat menjamin kehidupan yang selamat, aman dan nyaman baik di dunia maupun kelak di akhirat.

SESI 7: Membaca Komunitas dengan *Participatory Rural Appraisal (PRA)*

Gambaran Umum

Memahami pandangan, aspirasi, kebutuhan, modal, dan tantangan pada sebuah komunitas menjadi keniscayaan dalam aktivitas pemberdayaan. *Participatory Rural Appraisal (PRA)* atau yang dikenal dengan Kajian Desa secara Partisipatif merupakan perangkat analisis yang dapat mendorong pengembangan kemampuan masyarakat mengenali potensi, kebutuhan, dan aspirasi mereka, serta agar mereka memiliki keterampilan mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi.

Pada sesi ini, peserta akan diajak memahami lebih jauh pendekatan yang kini luas digunakan dalam pelaksanaan proyek dan program pembangunan tersebut. Dari pengertian, prinsip-prinsip, teknik, dan instrumen yang lebih praktis. Di sesi ini, peserta juga diajak untuk mengenali dan memahami sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh fasilitator saat memfasilitasi PRA. Pendekatan PRA dipandang tepat digunakan untuk memahami keadaan pedesaan dan proses proses pemikiran yang berlangsung pada setiap program, ataupun kegiatan pembangunan. Setelah mengikuti sesi, peserta memahami bagaimana menggunakan PRA dalam upaya mempromosikan nilai-nilai inklusi dan toleransi di komunitas mereka.

Tujuan

1. Peserta memahami pengertian, prinsip-prinsip, teknik dan instrumen *Participatory Rural Appraisal (PRA)* sebagai suatu pendekatan dan metode pengkajian partisipatif serta bagaimana fasilitator bersikap dalam memfasilitasi PRA.
2. Peserta memahami cara mempraktikkan teknik-teknik *Participatory Rural Appraisal (PRA)* dalam upaya promosi nilai-nilai inklusi di komunitas.

Pokok Bahasan

1. Mengenal konsep, prinsip-prinsip, teknik *Participatory Rural Appraisal (PRA)* dan sikap serta perilaku fasilitator PRA
2. Teknik –teknik *Participatory Rural Appraisal (PRA)*

Metode

1. Game *Find & Match* (Temukan dan Cocokkan)
2. Presentasi
3. Diskusi Kelompok

Waktu

120 menit

Alat dan Media

1. Kertas Plano
2. Spidol
3. Laptop
4. Proyektor

5. Materi Presentasi
6. Puzzle teknik PRA dan definisinya
7. Selotip

Langkah-Langkah Fasilitasi

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan menggali pengalaman peserta ketika akan memulai program di komunitas/desa tertentu.
2. Fasilitator mencatat semua jawaban peserta di kertas plano, dan memberikan penekanan pada jawaban peserta yang mengarah pada pentingnya kajian partisipatif desa.
3. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok untuk bermain *Find and Match*. Fasilitator membagikan teka-teki (*puzzle*) yang sudah diacak untuk menyusunnya berdasarkan metode, pengertian, tujuan dan pelaksanaan. Masing-masing kelompok mendapatkan 4 metode untuk dipasangkan. Waktu diskusi dibatasi 10 menit (Bahan game terlampir).
4. Setelah selesai mencocokkan, fasilitator meminta hasil diskusi ditempelkan dan dipresentasikan. Minta kelompok lain menanggapi hasil diskusinya.
5. Fasilitator memberikan penguatan pada pengertian serta tahapan pelaksanaan masing-masing metode, prinsip-prinsip, sikap dan perilaku fasilitator saat melakukan PRA, sesuai dengan konteks untuk membangun masyarakat yang inklusi.
6. Setelah itu fasilitator meminta peserta kembali ke kelompok, untuk simulasi melakukan pengkajian desa secara partisipatif dengan menggunakan metode metode tersebut.
8. Setelah simulasi, minta peserta merefleksikan pengalaman menggunakan teknik PRA tersebut jika seandainya teknik tersebut digunakan di komunitasnya.
9. Fasilitator menutup sesi dengan memastikan pelibatan seluruh perwakilan kelompok masyarakat, *no one left behind*, terutama perempuan dan kelompok rentan lainnya, termasuk kelompok minoritas agama dan disabilitas.

Lampiran Materi Teknik PRA¹

Teknik	Pengertian	Tujuan	Pelaksanaan
Ranking Masalah	suatu cara bagi masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan menentukan prioritas masalah yang akan dicari jalan keluarnya. Ranking masalah biasanya diikuti dengan pohon masalah	Membantu memprioritaskan masalah sehingga masyarakat dapat memfokuskan pemikirannya untuk menyelesaikan masalah paling penting.	Minta masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengurutkan masalah yang dihadapinya Sarankan dan jelaskan kriteria untuk meranking masalah tersebut (Kriteria: luas masalah/jumlah masyarakat yang terdampak, akibat, frekuensi) Beri skor setiap kriteria untuk menentukan ranking
Analisis Pemangku Kepentingan	suatu metode untuk menilai secara mendalam tentang karakteristik individu atau kelompok dan hubungannya terhadap sumberdaya atau suatu proyek. Kegiatan ini menilai stakeholder atau pemangku kepentingan yang berhadapan dengan sumberdaya dan akibat	Mengidentifikasi mitra potensial dalam pengelolaan sumberdaya; Menggalai pendekatan yang tepat sesuai dengan karakteristik stakeholder;	Identifikasikan sumber daya, proyek atau kegiatan yang akan dianalisis; Identifikasi daftar stakeholder atau pemangku-kepentingan dan tulis di lingkaran kertas. Gunakan lingkaran besar untuk stakeholder yang mempunyai pengaruh atau kekuatan besar; Persiapkan matriks pemangku-kepentingan analisis

¹ Disarikan dari Panduan Pengambilan Data dengan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA), Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2006

	yang ditimbulkan aktivitas kepada pemangku-kepentingan.	Mengetahui dinamika dan hubungan individu atau kelompok dengan berbagai kepentingan terhadap sumberdaya	<p>Letakkan lingkaran pada tempat yang tepat pada matriks tersebut:</p> <p>Pemangku-kepentingan yang dipengaruhi secara langsung dan positif</p> <p>Pemangku-kepentingan yang dipengaruhi secara langsung dan negative</p> <p>Pemangku-kepentingan yang dipengaruhi secara tidak langsung dan positif</p> <p>Pemangku-kepentingan yang dipengaruhi secara tidak langsung dan negatif</p> <p>Buat garis antar pemangku-kepentingan untuk melihat hubungan antara stakeholder dan positif negatif hubungan tersebut</p>
Pohon masalah	diagram yang menggambarkan masalah, sebab dan akibat. Ini dilakukan setelah masyarakat menyusun prioritas masalah	<p>Mengidentifikasi inti masalah, akan penyebab dan akibatnya</p> <p>Membantu untuk merumuskan pemecahan masalah</p>	<p>Pastikan kepada masyarakat masalah apa yang akan dianalisis</p> <p>Berikan contoh untuk membedakan masalah, sebab dan akibat</p> <p>Gambarkan sebuah pohon besar di papan tulis.</p> <p>Jangan menggambar cabang atau akarnya. Masalah ditulis di batang pohon tersebut.</p> <p>Biarkan peserta berpikir tentang sebab dari masalah dengan pertanyaan mengapa? Gambar suatu akar untuk tiap sebab.</p> <p>Ulangi pertanyaan mengapa untuk melihat sebab sekunder.</p> <p>Tulis di bawah akar sebelumnya.</p> <p>Kemudian tanya peserta tentang akibat yang ditimbulkan dengan pertanyaan Apa yang terjadi jika, dan seterusnya?</p>

<p>Diagram Venn</p>	<p>salah satu cara untuk menggambarkan hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lain dalam suatu daerah atau suatu proyek. Diagram venn ini menggunakan lingkaran-lingkaran untuk menggambarkan lembaga. Ukuran lingkaran menggambarkan besarnya pengaruh lembaga. Posisi lingkaran relatif ke batas menggambarkan lembaga tersebut di dalam atau di luar masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat yang mengerti hubungan antar lembaga dalam masyarakat.</p>	<p>Identifikasi kelompok atau lembaga baik internal maupun eksternal dan hubungannya dengan masyarakat atau antar lembaga. Identifikasi interaksi dan hubungan lembaga terhadap permasalahan tertentu</p>	<p>Persiapan alat bantu berupa lingkaran karton dengan berbagai ukuran. Kumpulkan masyarakat/tokoh masyarakat Jelaskan tujuan dan kegunaan diagram venn Persilahkan masyarakat menulis kelompok atau lembaga yang ada di karton lingkaran berdasarkan pengaruhnya. Lingkaran besar menunjukkan pengaruh besar dan sebaliknya. Persilahkan masyarakat untuk meletakkan lingkaran tersebut di atas kertas Hasil dari peletakan tersebut kemudian dibahas bersama sama</p>
<p>Kalendar musim</p>	<p>suatu cara untuk mendokumentasikan periode siklus reguler (satu musim) dan kegiatan-kegiatan utama yang ada selama setahun dan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kalendar musim ini berisi gambar-gambar lingkungan, budaya dan sosial ekonomi dalam periode satu tahun.</p>	<p>Untuk memberi informasi tentang periode penting selama setahun yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. • Untuk mengidentifikasi periode yang sesuai untuk melaksanakan suatu kegiatan</p>	<p>Persiapkan masyarakat/peserta dan buat kalender kosong pada kertas plano Mintalah peserta untuk mengidentifikasi periode-periode kondisi lingkungan, kegiatan-kegiatan, sosial ekonomi dalam satu tahun yang berpengaruh kepada kondisi masyarakat. Aktivitas atau kejadian yang dapat dicatat antara lain: - Kondisi lingkungan (cuaca, arus) – konflik, kasus kekerasan, dll</p>

Lintasan Sejarah	<p>Suatu cara untuk mengumpulkan informasi tentang perubahan perubahan mendasar yang terjadi di masyarakat seperti keadaan lingkungan, demografi dan kejadian lain yang mempengaruhi masyarakat. Cara ini mendokumentasikan perubahan yang ada dengan menggunakan simbol, kata-kata atau keduanya. Peserta kegiatan ini seharusnya adalah orang tua dan anak muda.</p>	<p>Mengetahui perubahan perubahan mendasar yang terjadi, baik perubahan yang baik atau buruk. Menjelajahi kemungkinan penyebab masalah yang dihadapi masyarakat pada saat ini. Membagi pengetahuan kepada kaum muda.</p>	<p>Buat suatu pertemuan dengan komposisi peserta terdiri dari orang tua, laki-laki, perempuan, pemuda maksimum 20 orang. Kelompokkan menjadi beberapa kelompok kecil (5-6 orang). Tiap kelompok membuat lintasan sejarah sendiri. Arahkan peserta untuk mengingat kejadian-kejadian yang mempengaruhi kondisi desa. Jika peserta kesulitan mengingat tahun, arahkan untuk mengingat kejadian apa yang mungkin timbul pada saat itu secara nasional (misalnya, agresi Belanda, peristiwa G30S, dll).</p>
Aktivitas Harian	<p>Suatu cara untuk mencari informasi tentang berbagai aktivitas yang dilakukan setiap hari baik secara produktif maupun reprodktif.</p>	<p>Mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan oleh berbagai masyarakat dalam satu hari, baik dari segi gender, mata pencaharian dan lainlain.</p>	<p>Adakan pertemuan dengan 10-20 peserta dengan komposisi berimbang (laki-laki dan perempuan, kelompok muda, disabilitas) Jelaskan maksud dan tujuan kegiatan Persiapkan bagan kosong pada kertas plano Mintalah peserta untuk menuliskan kegiatan hariannya dan waktu pelaksanaan setiap harinya untuk laki-laki dan perempuan.</p>

<p>Pemetaan partisipatif</p>	<p>Metode untuk mengumpulkan dan memetakan informasi yang ada serta yang terjadi dalam masyarakat serta kondisi sekitar. Informasi tersebut dikumpulkan, dipetakan dan dianalisis untuk membantu pengelola memahami kondisi yang lalu, kondisi saat ini serta memperkirakan potensi atau kondisi akan datang bagi pengelolaan pesisir. Juga untuk mengidentifikasi keterbatasan serta kesempatan pemanfaatan sumber daya alam bagi pembangunan pesisir yang berkelanjutan.</p>	<p>Mengetahui status sumberdaya dan habitat, konflik, penggunaan, keterlibatan atau peran laki-laki dan perempuan dalam sumberdaya. Menentukan daerah perlindungan atau daerah pengelolaan. Mengetahui jarak dan akses terhadap sarana prasarana serta penggunaan lahan. Mendukung masyarakat untuk mengidentifikasi, menemaiatkan, mengklasifikasi antara lain kondisi sumberdaya alam, kondisi sosial, aktivitas keseharian, dan lainnya. Mendukung terbangunnya hubungan antara berbagai jenis informasi.</p>	<p>Tentukan indikator yang akan dipetakan (sumberdaya, konflik, sarana prasarana, dll) Buat sket peta sesuai dengan indikator yang diinginkan Sediakan peta dasar yang baik (dari Coremap/Critic, Bakosurtanal, Pertanahan, dll) Duplikasikan peta dasar yang ada dan buat dengan skala yang sesuai. Pastikan bahwa masyarakat mengerti atau tahu orientasi peta (arah) Persilahkan masyarakat untuk menandai indikator yang diinginkan menggunakan perbedaan warna, simbol dan gambar. Buatlah legenda masing-masing simbol. Presentasikan peta yang sudah dibuat kepada seluruh peserta pemetaan. Buat salinan peta untuk pertinggal bagi masyarakat. Adakan cek kebenaran peta dengan kondisi nyata bersama sama masyarakat. Buat perubahan atau penyesuaian bila tidak sesuai dengan kondisi lapangan.</p>
------------------------------	--	--	--

Prinsip-Prinsip *Participatory Rural Appraisal* (PRA)

1. Partisipatif: masyarakat setempat diperlakukan sebagai mitra dalam pengumpulan dan analisis data; termasuk kelompok-kelompok yang termarginalkan.
2. Fleksibel: bukan sebagai metode baku, tergantung pada tujuan, sumberdaya, keterampilan, keahlian dan waktu;
3. Bekerja sama: antara pihak luar dan masyarakat, laki-laki maupun perempuan, dan gabungan berbagai bidang disiplin ilmu;
4. Sistematis: pengambilan sampel ter-strata agar memperbesar tingkat keabsahan dan kepercayaan; untuk memeriksa ulang hasil survei dasar
5. Menghargai pengetahuan orang lain dan belajar dari masyarakat.
6. Visualisasi: Semua data yang dikumpulkan dari masyarakat divisualisasikan oleh mereka
7. Kontinuitas.

Sikap dan Perilaku Fasilitator PRA

Dalam menjalankan peran sebagai fasilitator dalam kajian desa secara partisipatif, fasilitator harus mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip PRA yaitu:

1. **Membuka Kesempatan Belajar:** proses kajian desa secara partisipatif ini harus menggali pengetahuan dan pengalaman peserta. Fasilitator harus sabar mengawal proses agar data yang muncul betul-betul berbasis pengetahuan lokal. Fasilitator tidak boleh mengambil alih proses kajian tersebut, karena proses ini juga sebagai kesempatan belajar masyarakat. Pada proses yang partisipatif, proses akan sulit pada tahap-tahap awal karena suasana belum cukup cair. Tetapi proses selanjutnya akan sangat hidup apabila fasilitator terus bersabar dalam mendorong proses partisipasi masyarakat.
2. **Mendengarkan dan tidak mendominasi:** Karena pengalaman dari masyarakat yang paling penting dalam pembelajaran, fasilitator perlu lebih banyak mendorong mereka untuk mengungkapkan pengalaman dan pendapatnya. Fasilitator jangan terlalu banyak berbicara.
3. **Saling Belajar dan saling menghargai:** Cara menghargai masyarakat adalah dengan menunjukkan minat yang sungguh-sungguh pada pengetahuan dan pengalaman mereka. Seorang fasilitator yang baik, tidak menganggap pengetahuan dan pengalamannya lebih unggul dari masyarakat, melainkan menganggap masyarakat juga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Fasilitator perlu memiliki semangat untuk belajar dari masyarakat karena selalu terdapat banyak hal yang bisa dipelajari dari orang lain.
4. **Bersikap sederajat dan akrab:** Hubungan dengan masyarakat sebaiknya dilakukan secara tidak resmi, akrab dan santai sehingga suasana kesederajatan dapat tercipta. Masyarakat akan mempelajari lebih banyak kalau mereka merasa nyaman dengan tim fasilitator. Sebaiknya kita menghindari adanya jarak atau perbedaan antara Tim Fasilitator dan peserta.
5. **Tidak menggurui:** Proses belajar berlangsung dengan metode pendidikan orang dewasa. Orang dewasa memiliki pengalaman dan pendirian. Karena itu, fasilitator tidak akan berhasil apabila sikap guru yang serba tahu. Sebaiknya kita belajar dengan saling berbagi pengalaman agar diperoleh pemahaman yang kaya.

6. **Tidak memihak dan mengkritik secara frontal:** Perbedaan pendapat selalu bisa muncul sesama anggota masyarakat. Fasilitator tidak boleh menilai dan mengkritik semua pendapat secara frontal, juga tidak boleh bersikap memihak. Secara netral fasilitator mesti berusaha memfasilitasi komunikasi antara masyarakat yang berbeda pendapat untuk mencari kesepakatan dan jalan keluarnya.
7. **Bersikap terbuka dan rendah hati:** Fasilitator jangan segan untuk berterus terang kalau merasa kurang mengetahui sesuatu. Dari contoh ini masyarakat juga bisa memiliki sikap terbuka kepada kita. Biasakan agar masyarakat mengakui bahwa setiap orang punya pengalaman, pengetahuan dan kemampuan serta tidak mungkin tahu segalanya.
8. **Bersikap positif:** Seorang fasilitator sebaiknya selalu membangun suasana yang positif. Pelatihan seperlunya dilakukan untuk mendorong masyarakat mencari potensi diri sendiri. Jangan memperdebatkan permasalahan untuk mencari kesalahan seseorang, tetapi carilah jalan keluarnya. Doronglah masyarakat untuk melihat masalah sebagai tantangan.

SESI 8:

Pengorganisasian Masyarakat untuk Penguatan Inklusi Sosial

Gambaran Umum

Pengorganisasian Masyarakat adalah suatu proses ketika suatu komunitas tertentu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya serta mengembangkan keyakinannya untuk berusaha memenuhi kebutuhan itu termasuk menentukan prioritas dari kebutuhan tersebut yang disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia dan dengan usaha gotong royong (Sasongko.A, 1996). Tujuan pengorganisasian masyarakat diantaranya untuk membangun kekuatan masyarakat, memperkuat kekuatan komunitas basis, membangun jaringan, dan menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat bahwa mereka mempunyai kemampuan dalam penanggulangan masalah.

Komunitas yang dimaksud adalah keseluruhan elemen masyarakat beserta kelembagaan yang ada didalamnya. Komunitas biasanya terbentuk karena kesamaan wilayah mereka tinggal, atau karena kesamaan nilai-nilai. Anggotanya saling mengenal dan berinteraksi. Komunitas berfungsi dalam struktur sosial tertentu serta menerapkan dan membentuk norma-norma tertentu.

Sekolah Inklusi Perempuan memasukkan materi Pengorganisasian Masyarakat sebagai bagian untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayahnya telah mengaplikasikan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Pengorganisasian memiliki aspek-aspek, yaitu, proses pengorganisasiannya, masyarakat sebagai subjek pelaku dan fungsinya peran masyarakat dari berbagai elemen. Tujuan pengorganisasian masyarakat adalah mewujudkan suatu perubahan sosial yang transformatif dengan berangkat dari apa yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi sumber daya dan infrastruktur yang ada serta menyusun sasaran agar penyelesaian masalah atau pencapaian tujuan bisa dicapai. Dalam sesi ini juga akan diperkenalkan pendekatan *Asset Based Community Development (ABCD)* untuk membaca kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat dalam merespon isu sosial di wilayahnya. Sesi ini dimaksudkan untuk membekali peserta memiliki pemahaman dan keterampilan pengorganisasian di masyarakat.

Tujuan:

1. Peserta memahami konsep pengorganisasian masyarakat, dan prinsip-prinsip pelaksanaannya.
2. Peserta memahami tahapan pengorganisasian masyarakat untuk membangun masyarakat inklusif.

Pokok Bahasan

1. Pentingnya Pengorganisasian Masyarakat untuk Membangun Masyarakat yang Inklusif
2. Prinsip-prinsip dan Tahapan Pengorganisasian Masyarakat
3. Mengenal pendekatan ABCD.

Metode

1. *Game Puzzle* (Mengurutkan)
2. Presentasi
3. Diskusi Kelompok
4. Simulasi pengorganisasian

Waktu

120 menit

Alat dan Media

1. Kertas Plano
2. Spidol
3. Puzzle Tahapan Pengorganisasian
4. Selotip
5. Laptop
6. Proyektor
7. Materi Presentasi

Langkah-Langkah Fasilitasi

1. Fasilitator menjelaskan gambaran umum dan tujuan dari sesi ini, terkait pentingnya melakukan pengorganisasian di masyarakat.
2. Fasilitator menanyakan kepada peserta apa yang mereka pahami tentang pengorganisasian masyarakat.
3. Fasilitator menulis kata kunci dari setiap jawaban peserta di kertas plano. Setelah proses brainstorming selesai, fasilitator menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip pengorganisasian masyarakat. (Bahan terlampir)
4. Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok dan membagikan puzzle terkait kerangka kerja pengorganisasian masyarakat. Fasilitator meminta masing-masing menyusun kerangka kerja tersebut sebagai sebuah tahapan dalam 5 menit.

Tahapan	Penjelasan
Assesment Kebutuhan dan Masalah	Seorang Community Organizer (CO/Penggerak) harus mengetahui kebutuhan dan masalah yang ada di komunitas tertentu. Ia juga harus mendorong masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap kebutuhan dan masalahnya karena mereka yang paling mengetahui situasi di lingkungannya. Dengan memahami kebutuhan dan masalahnya, diharapkan mereka mau melakukan aksi lebih lanjut secara individu atau kolektif. Dalam proses ini, masyarakat diberdayakan dengan cara memperoleh keterampilan analisis dan meningkatkan tingkat kesadaran.
Menyusun D a f t a r Masalah	Semua kebutuhan dan masalah yang teridentifikasi oleh masyarakat dengan bantuan CO ini adalah sebuah proses membangkitkan pemahaman masyarakat terhadap situasi mereka sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan masalah akan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Menentukan Kebutuhan Prioritas	Tidak semua kebutuhan dan masalah akan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, semua kebutuhan dan masalah dianalisis tingkat keparahannya, besarnya, gejalanya, dan penyebabnya berdasarkan urutannya dan kemudian menentukan yang paling prioritas untuk diselesaikan.
M e m a h a m i dan Memilih Masalah	Dari daftar prioritas, dipilih masalah yang paling mendesak dan perlu segera ditangani. Semua permasalahan tidak dapat diselesaikan secara bersamaan, oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan salah satu permasalahan untuk memulai tindakan lebih lanjut. Berdasarkan urutan prioritas, yang pertama dalam daftar diambil untuk dicari solusinya.
Definisikan u l a n g masalahnya	Masalah yang dipilih dirumuskan ulang agar dapat dipahami lebih baik oleh masyarakat. Untuk perencanaan yang lebih baik, masalah harus dianalisis dan didefinisikan sebelum mengambil langkah lebih lanjut untuk mengatasinya. Sering kali seseorang melihat suatu fenomena sebagai sebuah masalah dari penampakkannya atau pada tingkat periferalnya, namun fenomena tersebut harus dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui apa sebenarnya masalah tersebut. Apakah hal ini mempengaruhi fungsi normal masyarakat? Berapa banyak orang yang terkena dampaknya? Bagaimana dampaknya? Jika hal ini tidak diatasi, bagaimana hal ini akan meresahkan masyarakat? Pertanyaan Pertanyaan ini untuk menganalisis dan mendefinisikan kembali masalahnya.
Merumuskan tujuan yang akan dicapai	Masalah yang didefinisikan ulang diubah menjadi tujuan yang akan dicapai. Tujuan harus diturunkan menjadi program dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah.

Mencari alternatif	Suatu permasalahan tidak hanya diatasi dengan satu penyelesaian saja karena akan membatasi praktik pengorganisasian masyarakat. Untuk memecahkan masalah yang dipilih, masyarakat harus memikirkan solusi alternatif sebanyak-banyaknya.
Menyusun Rencana Aksi	Untuk merealisasikan alternatif solusi yang dipilih, sebuah rencana aksi diusulkan di mana tanggung jawab ditetapkan dan struktur organisasi tentatif disiapkan. Kerangka waktu, sumber daya yang diperlukan dan personel yang terlibat diputuskan pada tahap ini. Rencana aksi harus dibuat sedetail mungkin terkait apa kegiatannya, siapa saja yang akan terlibat dalam pelaksanaan, kapan dan dimana pelaksanaannya, serta bagaimana pelaksanaannya.
Mobilisasi sumber daya	Untuk melaksanakan rencana aksi, sumber daya yang diperlukan harus diidentifikasi, dan dimobilisasi. Sumber dayanya bisa berupa waktu, uang, tenaga, dan material. Perkiraan dibuat dan sumber-sumber diidentifikasi untuk mobilisasi. Seringkali sumber daya manusia saja dapat membantu mencapai solusi. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki pemahaman menyeluruh mengenai penggunaan sumber daya manusia sehingga masyarakat dapat menawarkan diri terlibat. Selain itu, sumber daya lain harus dimobilisasi secara internal dan jika tidak memungkinkan, pertimbangkan untuk mendapatkannya dari sumber eksternal.
Melaksanakan Rencana Aksi	Setelah membuat rencana aksi beserta sumber dayanya, maka sekarang rencana tersebut harus dilaksanakan. Pelaksanaannya harus memperhatikan waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika melaksanakan rencana aksi, keterlibatan masyarakat dan partisipasi aktif mereka dengan menerima tanggung jawab harus dipastikan. Masyarakat harus dipersiapkan dan dibimbing untuk menjadi aktor utama dalam proses penyelesaian masalah
Evaluasi	Semoga Rencana yang dilaksanakan dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan penyimpangan terhadap tujuan. Setiap kekurangan atau hasil yang tidak diinginkan diidentifikasi dan alasan penyimpangan tersebut dibahas. Hasil yang positif dan diinginkan patut diapresiasi. Evaluasi dapat dijadikan sebagai komponen berkelanjutan dalam bekerja sama dengan masyarakat. Hal ini dapat diorganisir baik pada tingkat berkala atau pada akhir kegiatan baik di dalam organisasi, oleh personel organisasi atau oleh pihak luar atau ahli.

1. Setelah semua kelompok menunjukkan hasil kerjanya, fasilitator menjelaskan urutan tahapan pengorganisasian dan menjelaskan setiap tahapannya.
2. Setelah selesai, berdasarkan isu yang muncul di sesi sebelumnya, fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk simulasi melakukan pengorganisasian sesuai dengan tahapannya. Sebelum masuk ke dalam diskusi, fasilitator menjelaskan tentang pendekatan ABCD sebagai bagian penting bagi peserta untuk dapat memahami aset yang dimiliki untuk melakukan pengorganisasian. (Materi terlampir).

3. Setelah selesai mempresentasikan, fasilitator meminta peserta untuk simulasi dengan memasukkan pendekatan ABCD tersebut bagian dari simulasi.
4. Setelah masing-masing melakukan simulasi dalam kelompok, fasilitator meminta peserta merefleksikan pengalaman mereka melakukan pengorganisasian terkait tantangan dan bagaimana cara mengatasinya.
5. Fasilitator menutup sesi menjelaskan bahwa pengorganisasian masyarakat adalah proses jangka panjang jika dimaksudkan untuk membuat perubahan permanen. Sebaiknya seorang CO membaaur dengan masyarakat dan tetap berjarak untuk menghindari adanya ketergantungan dan menganggap CO adalah orang yang bisa menyelesaikan banyak masalah. Pastikan masyarakat memahami potensinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.

LAMPIRAN MATERI

Tiga aspek yang ada dalam pengorganisasian masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Proses: Pengorganisasian masyarakat merupakan proses yang terjadi secara sadar tetapi mungkin pula merupakan proses yang tidak disadari oleh masyarakat.
- b. Masyarakat: suatu kelompok besar yang mempunyai batas-batas geografis, bisa pula diartikan sebagai suatu kelompok dari mereka yang mempunyai kebutuhan bersama dan berada dalam kelompok yang besar tadi.
- c. Berfungsinya masyarakat (*functional community*); Menarik orang-orang yang inisiatif dan dapat bekerja, membuat rencana kerja yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, dan melakukan usaha-usaha atau kampanye untuk mencapai rencana tersebut.

Prinsip-prinsip Pengorganisasian Masyarakat

1. Pemberdayaan,
2. Kompetensi masyarakat,
3. Partisipasi aktif, dan
4. "mulai dari mana masyarakat berada"

Pendekatan ABCD (Asset Based Community Development): Pemetaan dan Mobilisasi aset dan potensi komunitas untuk pencapaian Tujuan

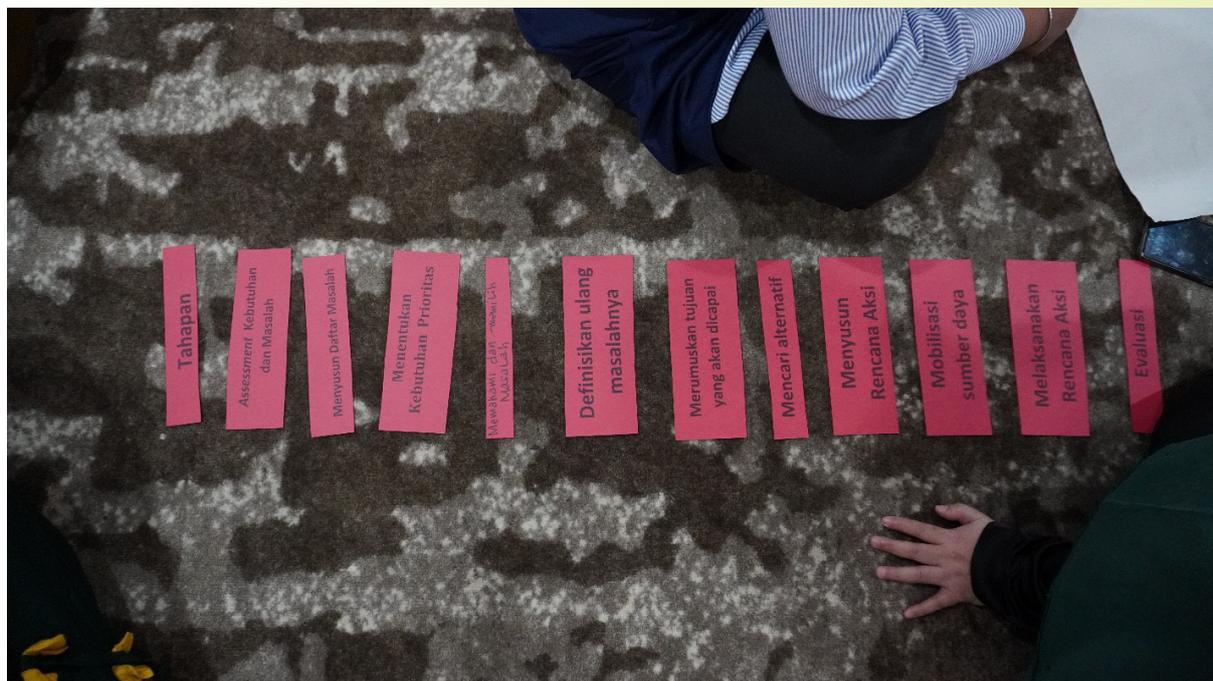
Berbicara mengenai pemberdayaan dan keberdayaan masyarakat, maka ada ragam yang cukup kaya terkait pendekatan. Secara sederhana, salah satu pendekatan yang jelas telah lama ada dan cukup mainstream dalam sejarah pemberdayaan komunitas adalah PAR atau *participatory action research*. Pada perkembangan selanjutnya, ada pendekatan lain yang saat ini dikenal dengan nama *Asset-based community development* atau biasa disingkat menjadi ABCD. Pada dasarnya definisi, keunikan, tahapan, cara penggunaan dalam isu atau tema GEDSI.

Pada dasarnya, ABCD adalah pendekatan yang mendorong paradigma gelas separuh penuh atau perspektif yang lebih positif dan optimis melihat isu atau fenomena yang ada. Dalam hal ini, meskipun ABCD tetap mengakui ada masalah atau persoalan dan dalam hal ini bisa jadi merupakan ketimpangan gender, relasi kuasa terkait kemiskinan dan penyandang disabilitas dan lain sebagainya, tetap saja

ada upaya untuk mendorong komunitas melihat kenyataan dengan perspektif lebih optimis dan disertai langkah langkah strategis yang praktis.

Tahapan dalam ABCD terdiri dari *discovery* atau temu kenali aset, *dream* yaitu menentukan misi atau mimpi yang ingin dicapai, entah itu untuk pengembangan aset murni atau penyelesaian masalah dan persoalan dengan memobilisasi aset, yang ketiga adalah *desain* atau perencanaan kegiatan atau program dan yang terakhir adalah *destiny* atau realisasi dari kebermanfaatn program. Secara sederhana, ABCD yang juga bisa disebut dengan *Asset Based Community Development* mencoba merubah cara pandang masyarakat yang selama ini cenderung negatif dan akhirnya berdampak pada rasa tidak percaya mereka menjadi lebih positif optimis yang diharapkan berujung pada rasa berdaya mereka dalam menyelesaikan persoalan, termasuk dalam hal ini isu isu GEDSI.

Prinsip prinsip dalam ABCD secara umum sama dan selaras dengan prinsip dalam PRA atau PAR yaitu prinsip *community driven* atau digerakkan oleh komunitas, prinsip *respect for indigenous knowledge* atau penghormatan terhadap pengetahuan dan kebijaksanaan lokal, dan *partnership* atau kemitraan yang lebih seimbang antara komunitas dan stakeholder lainnya seperti kampus, pemerintah, dan lain sebagainya.



SESI 9: Refleksi Sekolah Inklusi Perempuan

Gambaran Umum

Proses refleksi adalah proses penting dari sebuah pelatihan. Sesi ini diselenggarakan untuk mengendapkan apa yang sudah dipelajari bersama selama 3 hari dan kemudian mendialogkan dengan pengalaman yang dimiliki masing-masing peserta. Refleksi ini diharapkan dapat menginternalisasi pemahaman yang diperoleh untuk kemudian mengimajinasikan bagaimana memberikan pemahaman tersebut kepada komunitas masing-masing usai pelatihan. Membagikan dan mempraktikkan pengalaman belajar ini diharapkan akan melanggengkan pengetahuan dalam

ingatan, menerjemahkannya dalam perilaku, dan memulai perubahan untuk menciptakan masyarakat inklusif.

Refleksi juga dilakukan untuk mengingatkan kembali tugas kekhalfahan manusia, untuk memberikan manfaat seluas-luasnya untuk umat manusia. Refleksi berusaha mengingatkan peserta akan berapa banyak bakti yang sudah mereka berikan untuk komunitas, dan lingkungan terkecil, yakni keluarga. Disamping itu, sesi ini juga ditujukan untuk membangun komitmen peserta Sekolah Inklusi Perempuan untuk bersama membuat perubahan, dimulai dengan mengenali lingkungan, melakukan pengorganisasian, dan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk perubahan yang diimpikan. Peran inilah sesungguhnya yang menjadi mandat manusia di muka bumi.

Tujuan

1. Peserta memiliki komitmen untuk mengaplikasikan pengetahuannya di komunitas masing-masing untuk mewujudkan masyarakat inklusif.
2. Peserta memberikan masukan kepada penyelenggara untuk perbaikan kualitas Sekolah Inklusi Perempuan.

Pokok Bahasan

- Refleksi
- Metode
- Testimoni

Waktu

30 menit

Alat dan Media

1. Kertas Plano
2. Spidol
3. Sticky Note

Langkah-Langkah Fasilitasi

1. Fasilitator menjelaskan gambaran umum dan tujuan sesi.
2. Fasilitator meminta peserta duduk melingkar dan saling memegang tangan peserta di sampingnya.
3. Fasilitator meminta peserta merefleksikan perubahan pengetahuan, persepsi dan perspektif yang mereka alami selama pelatihan. Kegiatan ini dilakukan masing-masing selama satu menit. Gunakan alarm untuk memastikan semua bicara tidak lebih dari 1 menit.
2. Setelah semua selesai, fasilitator meminta peserta menarik nafas, menahannya beberapa detik, dan melepaskannya.
3. Setelah selesai, fasilitator membagikan 2 kertas tempel (*sticky note*) kepada peserta untuk menuliskan apa yang sudah baik dari Sekolah Inklusi Perempuan dan apa yang perlu diperbaiki sebagai input untuk perbaikan kegiatan selanjutnya.
4. Setelah semua peserta menempelkan input mereka, fasilitator masuk ke sesi Rencana Tindak Lanjut.

Sesi 10: Rencana Tindak Lanjut

Gambaran Umum

Rencana tindak lanjut adalah salah satu elemen penting dalam suatu pelatihan untuk memastikan peserta mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang didapat selama proses pelatihan. Rencana tindak lanjut ini juga bagian dari upaya untuk mengetahui *use of output* atau sejauh mana output yang dicapai selama pelatihan bisa digunakan oleh peserta di komunitasnya masing-masing. Dari proses ini akan ada proses dialektika antara pengetahuan dan realitas sehingga peserta dapat merefleksikan pengetahuannya.

Tujuan

1. Peserta mampu Menyusun Rencana Tindak Lanjut pasca Sekolah Inklusi Perempuan
2. Peserta memiliki komitmen untuk melaksanakan Rencana Tindak Lanjut setelah Sekolah Inklusi Perempuan ini selesai.

Pokok Bahasan

Rencana Tindak Lanjut

Metode

Menulis

Waktu

10 menit

Alat dan Media

1. Kertas Plano
2. Spidol
3. Kertas tempel (*sticky note*)

Langkah-Langkah Fasilitasi

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan membagikan kertas kepada peserta untuk menuliskan Rencana Tindak Lanjut masing-masing yang akan dijalankan di masing-masing komunitas mereka.
2. Setelah selesai, fasilitator meminta peserta menempel pada kertas plano.
3. Fasilitator mengklasifikasi rencana tindak lanjut yang sama, menyepakati bersama peserta bagaimana memonitornya agar bisa dilihat perubahan yang dihasilkan pasca Sekolah Inklusi Perempuan ini.
4. Fasilitator mencatat usulan peserta sebagai bahan untuk penyelenggara memantau *use of output* dari program.
5. Fasilitator menutup sesi, menyampaikan permohonan maaf jika ada yang kurang berkenan dari apa yang disampaikan selama memfasilitasi, dan menyerahkan sesi penutupan kepada panitia penyelenggara.

BAB IV

PENUTUP

Modul Sekolah Inklusi Perempuan ini yang didesain dalam bentuk pelatihan tiga hari ini bertujuan meningkatkan kapasitas tokoh perempuan dari berbagai organisasi Islam. Namun, secara umum, modul ini juga bisa digunakan untuk siapapun yang ingin menyelenggarakan pelatihan dengan menggunakan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* sebagai pendekatan dalam upaya membangun masyarakat yang inklusif. Pelatihan ini memperkenalkan konsep *Mubadalah* sebagai inovasi mengenalkan konsep kesetaraan gender dalam perspektif Islam, juga menggali bagaimana pendekatan GEDSI dalam perspektif Islam. Modul ini juga memberikan pengetahuan pengantar terkait intoleransi, radikalisme, ekstremisme kekerasan, hingga terorisme sebagai ancaman keamanan insani, dan bagaimana konsep Islam *Rahmatan Lil `Alamin* bisa menjawab ancaman tersebut.

Modul ini adalah dokumen hidup yang sangat terbuka untuk perbaikan, masukan, dan kritik membangun sehingga dapat memberikan kontribusi pada khazanah keilmuan di masyarakat. Harapannya, pengetahuan tentang *Participatory Rural Appraisal (PRA)* dan pengorganisasian masyarakat dapat betul-betul dipraktikkan di komunitas, daya kritis masyarakat dalam membaca fenomena di lingkungan mereka bertumbuh. Dengan modul ini, para pengguna diharapkan mampu menggunakan lensa gender dalam menganalisis masalah, mengidentifikasi kapasitas dan kerentanan masyarakat demi mendorong perubahan di komunitas mereka masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. "Medical Assistance in Dying (Maid): Human and Humanity in The Study of Fiqh Maqasid", *Jus ticia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 20 No 1, (Juni, 2023).
- AM, Ahmad Muntaha. NU Online, Bahtsul Masail Pandangan Islam terhadap Penyandang Disabilitas, dalam <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/pandangan-islamterhadap-penyandang-disabilitas-l2Dq5> diakses pada tanggal 08 September 2023.
- Anam, Choirul. *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia (Sebuah Laporan Awal) Cetakan Pertama* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016)
- Aqila, Nayla Maisun Nur. "Melawan Stigma terhadap penyandang disabilitas" dalam <https://www.its.ac.id/news/2022/10/27/melawan-stigma-terhadap-penyandang-disabilitas/> diakses pada tanggal 26 September 2023.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah a Beginner's Guide*, (London Office: The International Institute of Islamic thought).
- Badan Pusat Statistik, "Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2022", dalam [https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/08/01/2042/indeks-ketimpangan-gender--ikg--2022.html#:~:text=Indeks%20Ketimpangan%20Gender%20\(IKG\)%20Indonesia,tahun%202021%20yang%20sebesar%200%2C465](https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/08/01/2042/indeks-ketimpangan-gender--ikg--2022.html#:~:text=Indeks%20Ketimpangan%20Gender%20(IKG)%20Indonesia,tahun%202021%20yang%20sebesar%200%2C465) diakses pada tanggal 26 September 2023.
- Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023" dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html> diakses pada tanggal 26 September 2023.
- Baderin, Mashood A. "Islam and the Realization of Human Rights in the Muslim World: A Reflection on Two Essential Approaches and Two Divergent Perspectives", *Muslim World Journal of Human Rights*, Volume 4, Issue 1, Article 5, (2007).
- Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Bangun Sistem Perlindungan Kokoh bagi Anak dengan Disabilitas", dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3358/bangun-sistem-perlindungan-kokoh-bagi-anak-dengan-disabilitas/hyzvt/b192981.html>, diakses pada 05 September 2023.
- Budaya, Budi. "Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya di Myanmar terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Negara Sekitar, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 11 Nomor 1 (Mei, 2017), 106-120.
- Elewa. "The Objectives of Maqasid al-Shari'ah", *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 28: 4, 118-124.
- ESCAP, *Introduction to Hierarchy of Introduction to Hierarchy of Objective and Logical Objective and Logical Framework* (Astana, Kazakhstan, 2014).
- European Commission, "Employment, Social Affairs & Inclusion" dalam <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en> diakses pada tanggal 26 September 2023.

- Falson, Jerri, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Mengupas Keadilan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (Studi Implementasi Kebijakan Layanan pada KPKNL Ternate)" dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/bacaartikel/14110/Mengupas-Keadilan-Gender-Disabilitas-dan-Inklusi-Sosial-StudiImplementasi-Kebijakan-Layanan-pada-KPKNL-Ternate.html> diakses pada tanggal 26 September 2023.
- Gandhawangi, Sekar. "Belum Semua Penyandang Disabilitas Terdata" dalam <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/02/belum-semuapenyandang-disabilitas-terdata> diakses pada tanggal 26 September 2023.
- Ghufran M. H. Kordi K. BaKTINews, "Minoritas, Marginal, dan Rentan" dalam <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/minoritas-marginal-dan-rentan> diakses pada tanggal 10 September 2023.
- Hastuti, dkk, *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas* (Jakarta: The SMERU Research Institute, 2020).
- Hidayah, Bashirotul, dkk. *Membumikan Rahmatan lil Alamin di Tengah Keberagaman* (Fatayat NU: Modul Dakwah Fatayat NU Jatim).
- Hidayana, Istato dan Nurhadi. "Memaknai Realitas Kemiskinan Kultural di Pedesaan: Sebuah Pendekatan Partisipatoris". *Journal of Social Development Studies*, Volume 1, Issue 1, March 2020, 13-24.
- IACEPA ECP Katalis. *Gender Equality, Disability, Social Inclusion and Safeguards Guidance Note and Toolkit*, September 2021.
- INOVASI. *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) Strategy*, Inovasi Phase II, November 2020.
- Ishomuddin, Ahmad. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018).
- Kemenko PMK, "Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia" dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandangdisabilitas-di-indonesia#:~:text=Saat%20ini%2C%20jumlah%20penyandang%20disabilitas,d isabilitas%20terbanyak%20pada%20usia%20lanjut> diakses pada tanggal 26 September 2023.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, *Statistik Gender Tematik Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Definisi Penyandang Disabilitas" dalam <https://kemensos.go.id/definisi-penyandang-disabilitas> diakses pada tanggal 26 September 2023.
- Knowledge Sector Initiative. *Gender Equality and Social Inclusion Strategy 2018-2022*.
- KOMPAK, *Strategi Kesetaraan Gender & Inklusi Sosial KOMPAK 2017-2018* (Jakarta: KOMPAK).

KOMPAK. Gender Equality, Disability and Social Inclusion Meta-Analysis Report KOMPAK 2015-2022.

Kuncoro, Joko. "PRASANGKA DAN DISKRIMINASI" dalam <file:///Users/achmadfirdaussani/Downloads/236-424-1-SM.pdf>.

Kurniawan, Aris. SINDOnews, "Regsosek, Langkah Awal Bappenas Atasi Eksklusi Sosial dan Layani Kelompok Rentan" dalam <https://ekbis.sindonews.com/read/980785/77/regsosek-langkah-awalbappenas-atasi-eksklusi-sosial-dan-layani-kelompok-rentan-1672146720>, diakses pada 12 September 2023.

Limpong, Ronny Josua dkk. *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).

Limpong, Ronny Josua dkk. *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).

Maftuhin, Arif, dkk. *Islam dan Disabilitas Dari Teks ke Konteks*, (Yogyakarta: Gading, 2020).

Maftuhin, Arif. "Mosques for All: Nahdlatul Ulama and the Promotion of the Rights of People with Disabilities", *Journal of Indonesian Islam*, Volume 15, Number 02, (December, 2021).

Mahbob, Tan Sri Sulaiman. "Social inclusion the Islamic way", *New StraitsTimes*, dalam <https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2019/08/512174/socialinclusion-islamic-way> diakses pada tanggal 09 September 2023.

Miskari, "Fikih Muslim Minoritas di Non-Muslim Mayoritas".

Mubadalah.id, "Keadilan Hakiki sebagai Prasyarat Mubadalah" dalam <https://mubadalah.id/keadilan-hakiki-sebagai-prasyarat-mubadalah/> diakses pada tanggal 26 September 2023.

Muchlishon. NU Online, "Empat Hal yang Terkait dengan Inklusi Sosial" dalam <https://nu.or.id/jelang-muktamar-nu/empat-hal-yang-terkait-dengan-inkluisosial-KPphr> diakses pada tanggal 12 September 2023.

Muhayah, "Difabel Dalam Al-Qur'an" dalam <https://www.pta-banten.go.id/artikelpengadilan/876> diakses pada tanggal 27 September 2023.

Nasar, M Fuad. "penyandang disabilitas dalam Pandangan Agama dan Masyarakat",

Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam <https://kemenag.go.id/opini/penyandang-disabilitas-dalam-pandangan-agamadan-masyarakat-hi3ww1> diakses pada tanggal 08 September 2023.

Novrizaldi, "Menko PMK Paparkan "Best Practice" Indonesia Kendalikan Kemiskinan di Masa Pandemi Covid 19" dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmkpaparkan-best-practice-indonesia-kendalikan-kemiskinan-di-masa-pandemicovid-19> diakses pada tanggal 26 September 2023.

Nur, Iffatin. "Fiqih Jalan Tengah (Mempertemukan Maqashid Syari'ah, Hukum, dan Realitas Sosial)", *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 2, (Desember, 2019)

Nurdin, M. Fadhil. Eksklusi Sosial dan Pembangunan Makna, Fokus dan Dimensi untuk Kajian Sosiologis, Makalah disajikan pada Kegiatan Kongres II Asosiasi Program

Studi Sosiologi Indonesia dan Konferensi Nasional Sosiologi Indonesia IV Manado, 20-23 Mei 2015.

Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. Modul dan Bahan Ajar Konsep Gender dalam Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Nurhayati, Elis. ForestDigest“10 Kisah Perubahan Masyarakat Adat dan Lokal Terpencil” dalam <https://www.forestdigest.com/detail/1014/kisah-perubahanmasyarakat-adat> diakses pada tanggal 01 September 2023.

Nurhayati. “Fikih Minoritas: Suatu Kajian Teoretis”, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, (Juli, 2013).

OECD, Gender Equality in Times of Crisis SIGI 2023 Global report, dalam <https://www.oecd.org/stories/gender/social-norms-and-genderdiscrimination/sigi/> diakses pada tanggal 05 September 2023.

Ombudsman Republik Indonesia, “Pembatasan Layanan Pasien BPJS Kesehatan Diskriminatif” dalam <https://ombudsman.go.id/news/r/pembatasan-layananpasien-bpjs-kesehatan-diskriminatif> diakses pada tanggal 26 September 2023.

Paces Plus Implementation Unit Strategic Plan 2025.

Panduan Pelaksanaan Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera.

Prabawati, DiskominfoKaltim, “Terdapat 987 Laporan Kekerasan Yang Dialami Penyandang Disabilitas Tahun 2022” dalam.

<https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/terdapat-987-laporankekerasan-yang-dialami-penyandang-disabilitas-tahun-2022> diakses pada tanggal 11 September 2023.

Pransiska, Toni. “Kejayaan Islam dan Kontribusi Para Muslim penyandang disabilitas: Sebuah Pendekatan Historis”, *Turāst: Jurnal Penelitian & Pengabdian*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2017.

Purnomo, Bitoh. “*Maqāshid Al-Syarī'ah and Human Rights Problems, Nurani*”, VOL. 20, No. 1, (Juni, 2020): 1 - 12.

al Qurtuby, Sumanto. “KH. Ali Musthafa Ya'kub Dalam Kenangan” dalam <https://www.dw.com/id/demam-ibadah-individual-lupa-ibadah-sosial/a19228994> diakses pada tanggal 26 September 2023.

Ra'is, Dekki Umamur. “Peta Inklusi Sosial dalam Regulasi Desa”, *REFORMASI*, Volume 7, No. 2 (2017).

Resti, Annisa Wirda. biner, "Ekslusi Sosial Terhadap Anak Jalanan" dalam <http://biner.fti.unand.ac.id/ekslusi-sosial-terhadap-anak-jalanan/#> diakses pada tanggal 10 September 2023.

Subasno, Yohanes. Masalah Disabilitas dan Sosial Kemasyarakatan. Sebuah Penelitian Permulaan Bidang Pastoral Terapan bagi yang berkebutuhan Khusus.

Sudiaman, Maman. Republika, "Kemiskinan dan Inklusi Sosial" dalam. <https://news.republika.co.id/berita/odi117319/kemiskinan-dan-inklusi-sosial> diakses pada 10 September 2023.

Suri. 'Aisyiyah Kuatkan Mainstreaming isu GEDSI dalam Program Organisasi, 07 Juli 2022, 'Aisyiyah Pusat.

Suryaningrum, Diah dkk. *Potret Pengawasan Pelayanan Publik di Daerah dan Kelompok Marjinal* (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2019).

Suwanto. LP Ma'arif NU Jawa Tengah, penyandang disabilitas dalam Pandangan Islam, dalam <https://maarifnujateng.or.id/2022/03/penyandang-disabilitas-dalampandangan-islam/> diakses pada tanggal 08 September 2023.

The Monitoring and Evaluation Toolkit, Logframe: Key Terms pada <https://thetoolkit.me/approaches-tools/key-tools/the-logicalframework/logframe-key-terms/> diakses pada 20 Oktober 2023.

Training-Workshop on Gender Equality. Disability and Social inclusion Mainstreaming, 23-26 November 2021, Via Google Meet Platform.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Usman, Sunyoto. Center for Southeast Asian Social Studies Universitas Gajah Mada, Inklusi Sosial di Era Digital (Social Inclusion in the Digital Age) dalam <https://pssat.ugm.ac.id/inklusi-sosial-di-era-digital-social-inclusion-in-thedigital-age/> diakses pada tanggal 01 September 2023.

WEDC, *An introduction to the Logical Framework* (Loughborough University, 2011).

Yunanto, Sutoro Eko. *Panduan Kepemimpinan Inklusif* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2021).

Melani Abdulkadir-Sunito, dkk, *Ruang Hidup dan Penghidupan Analisis dengan Perspektif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) Sebuah Panduan*, (The Samdhana Institute, Juli 2019)

Leya Catleya Soeratman, *Acuan pelatihan Pengarusutamaan GEDSI Dalam Program Konsorsium Inklusi INFID* (Maret 2022)



**BIODATA
PENULIS**



Siti Hanifah, lahir di Jember 01 February 1978. Ibu dari 5 orang anak ini menyelesaikan S1 di STAI Al Falah Assunniyyah Kencong Jember jurusan Pendidikan Agama Islam, dan program Magister di Universitas Negeri Jakarta jurusan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Beberapa shortcourse yang pernah diikuti; Human Rights Leadership to Influence Policy, Australia Award Indonesia (2022), Training on Minority Rights and Advocacy Toolkit, Minority Rights Group International (2022), Training on Empowerment Leadership of SDGs and Human Rights, Korean Association of Human Rights Studies (2022), Training on Restorative Practices and Reflective Structured Dialogue (2021), EIAP II InterReligious Peacebuilding Design & Monitoring Training, Thailand (2019), Feminist Leadership on Peace and Security Institute, Istanbul Turkey, CREA (2015), dan masih banyak lagi. Konsen dengan isu perempuan, perdamaian dan keamanan, Studi Islam, dan gender. Memiliki pengalaman 16 tahun bekerja untuk pengorganisasian masyarakat, terutama untuk penguatan kepemimpinan perempuan dalam pembangunan perdamaian dan pencegahan ekstremisme kekerasan. Aktif melakukan advokasi baik di nasional maupun local dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional dan Rencana aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN dan RAD P3AKS) dan Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi daerah Pencegahan dan Penanganan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN dan RAD PE). Ia juga sebagai penyusun Peraturan Menteri PPPA No. 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah P3AKS.

Sebagai fasilitator, berpengalaman mendampingi beberapa program pemerintah; Fasilitator Nasional untuk program Perempuan Agen Perdamaian di 32 Provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2019 dan 2020, sebagai Master Trainer program Wawasan Kebinekaan Global Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2021-2022, serta memfasilitasi pelatihan Kelompok Kerja P3AKS di Aceh, Maluku, Jawa Timur, Lampung,

dan Sulawesi Tengah bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan AMAN Indonesia (2020 -2023).

Beberapa modul yang pernah ditulis bersama tim; Training Dialog Reflektif Terstruktur (2023), Training Membangun Ketahanan Masyarakat (2023), Panduan Dialog Reflektif Terstruktur (2022), Training Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (2021), Modul Perempuan Agen Perdamaian AMAN Indonesia-BNPT (2019), Modul Sekolah Perempuan Perdamaian (2015), dan Modul Sekolah Perempuan Perdamaian (2009). Sedangkan buku yang ditulis bersama dengan tim; Multikulturalisme di Australia, Australian Embassy (2016), Praktek Baik Perempuan Merespon Covid, Kalyanamitra (2020), Faith and Pandemic, Australia Global Alumni (2022)

Beasiswa yang pernah diterima; Australia Award Indonesia (AAI), 2021-2022, UK Embassy, Discovery Islam Program, London-Birmingham, October 2017, CREA India, Feminist Leadership Institute: Integrated Security and Peace Building, Turkey, February 2015. Australia-Indonesia Institute, Muslim Exchange program, April 2013 dan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Kementerian Agama RI Tahun 2011.

Pengalaman Kerja pernah menjadi Guru di MTs Al Ma'arif Kencong Jember, dosen filsafat di STAI Al Falah Assunniyyah Kencong Jember, mengajar Kitab Kuning di Pesantren Al Karimiyah Sawangan

Depok, General Affair di PT Expert Kontrol Nusantara Bogor, dan sebagai finance dan admin (2007 -2009), Staf Divisi Pendidikan (2009 -2011), Koordinator Community Organizing (2011-2017), dan terakhir sebagai Program Manager (2018- Mei 2023) di The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia). Saat ini bekerja sebagai National Consultant for Women Peace and Security Specialist di UN Women.

Sebagai Co Founder Yayasan Bhakti Budhi Pertiwi yang didirikan sejak 2017 di Bogor, aktif melakukan pendidikan alternative kepada anak-anak, perempuan dan masyarakat untuk penanaman nilai toleransi, menghormati perbedaan dan pembangunan perdamaian. Yayasan ini meliputi Pesantren Nanggerang dan Taman Baca Masyarakat yang telah bekerjasama dengan DPPM Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Yayasan Rebung Cendani dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Informasi Kontak di alehanifah@gmail.com.



Dr. Nabiela Naily, S.SI, M.HI., MA adalah dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan bidang keahlian hukum Islam, hukum keluarga, gender dan anak, serta *University-community engagement* (kemitraan dan pemberdayaan kampus dan masyarakat). Menyelesaikan studi S1 di fakultas dirasah islamiyah UIN Syarif Hidayatullah (saat itu sedang dalam kerjasama dengan al Azhar), Penulis juga sempat belajar sosiologi di FISIP, UGM meski tidak diselesaikan. Studi magister (S2) ditempuh di dua tempat yaitu Magister Hukum Islam (MHI) di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan Faculty of Asian Studies, Australian National University (Master of Arts in Asian Studies). Studi lanjutan ini mengambil fokus hukum keluarga, gender dengan pengayaan keilmuan ilmu sosial dan politik. Studi doktoral penulis, diambil di UINSA dengan disertasi yang dihasilkan dari riset hukum keluarga dan isu perlindungan perempuan dan anak (sebuah studi pemetaan atas Indonesia, Turki dan Aljazair)

Menjadi pengajar sejak tahun 2005, penulis memiliki perhatian sejak lama terhadap isu-isu gender dan anak serta aktif di PSGA (Pusat studi gender dan anak) di UINSA. Selain itu, penulis juga pernah aktif di bidang pengajaran Bahasa Inggris selama beberapa tahun; selain aktif menjadi pengajar, penulis juga menjadi kordinator intensive English Fakultas Syariah dan Hukum di bawah kordinasi Pusat Pengembangan Bahasa. Pada 2013, penulis mengambil TESOL course (Teaching English as a Foreign Language) di University of Canberra. Lembar hidup berikutnya menuntun penulis kemudian banyak terlibat dalam pembelajaran dan kegiatan intensif di bidang tata Kelola Demokratis (Democratic Governance), University-Community Engagement atau kemitraan kampus masyarakat, pemberdayaan komunitas dan ini meliputi aktifisme di tata kelola pendekatan Community Based Research (CBR), *Asset Base Community Development* (ABCD), *Service Learning* (SL) dan berbagai tema *democratic government* serta *peace building* lainnya. Selama 6 tahun penulis menjadi tim manajemen proyek SILE/LLD (projek kerjasama antara UINSA di bawah Kemenag dengan pemerintah Canada.

